



RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



**BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 050/0104 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Panduan Sistematika Renstra SKPD dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta perkembangan kebijakan pembangunan secara nasional dan daerah mengakibatkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oleh karena itu Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung 2015 – 2019 mengalami penyesuaian dikarenakan target kinerja sudah tidak sesuai lagi sehingga dilakukan revisi.

Penyusunan Renstra 2015 – 2019 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan ketahanan pangan, pada lingkungan strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi sehingga arah dan keluarannya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Bandar Lampung, Juli 2016
Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M.Agr.Ec
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1. Maksud	6
2. Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
II BAB II	9
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPD	9
a. Struktur Organisasi	10
b. Tugas Pokok dan Fungsi BKPD	10
c. Unit Pelaksana Teknis	11
d. Dewan Ketahanan Pangan	12
2.2. Sumber Daya SKPD	14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.4. Tantangan dan Peluang	72
III BAB III	73
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI	73
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan	73
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75
1. Visi	75
2. Misi	77
3.3. Telaahan Renstra BKP Kementerian Pertanian	78
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	81
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	83

IV	BAB IV	86
	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	86
4.1.	Visi dan Misi	86
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	87
4.3.	Strategi dan Kebijakan	90
V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	90
5.1.	Rencana Program	91
5.2.	Rencana Kegiatan	91
5.3.	Kelompok Sasaran	92
VI.	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	114
VII.	PENUTUP	116
	LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Lampung Tahun 2015 -2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Lampung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Badan Ketahanan Pangan berkewajiban menyiapkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang tentang Pangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005 – 2015
15. 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
24. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
26. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Lampung;
27. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah Provinsi Lampung;
28. Peraturan Gubernur nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Lampung;

29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produksi Hasil Pertanian Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
30. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung;
31. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyediaan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (beras) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011;
32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung Tahun 2012;
33. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian Beririgasi;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung;
36. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Lampung;
37. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/27/II.05/HK/2010 dan G.436/1126/4/DT/2010 Tahun 2010 tentang Program Otoritas Kopetensi Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
38. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/101/IV.01/HK/2010 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
39. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/164/B.IV/HK/2010 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2010;
40. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/135/B.IV/HK/2011 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2011;

41. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/424/III.15/HK/2010 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Lampung;
42. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/551/II.02/HK/2010 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
43. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 050/0104 Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Panduan Sistematis Renstra SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung tahun 2015-2019;
- b. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun dengan tujuan:

- a) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra BKPD Provinsi Lampung dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- c) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;

- d) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu- isu strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan visi dan misi jangka menengah Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 -2019. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung untuk kurun waktu lima tahun.

Bab VI. Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Kelembagaandi bidang Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dimulai pada saat pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000. Saat itu pembangunan di bidang ketahanan pangan ditangani oleh Sub Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui melalui Perda Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung tanggal 1 Maret 2007 dibentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah. Kemudian diperbaharui melalui Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Sejak awal tahun anggaran 2008 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang ketahanan pangan.

Dalam perjalanannya, untuk perbaikan kinerja maka struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah telah mengalami perbaikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Lampung. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Saat ini Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

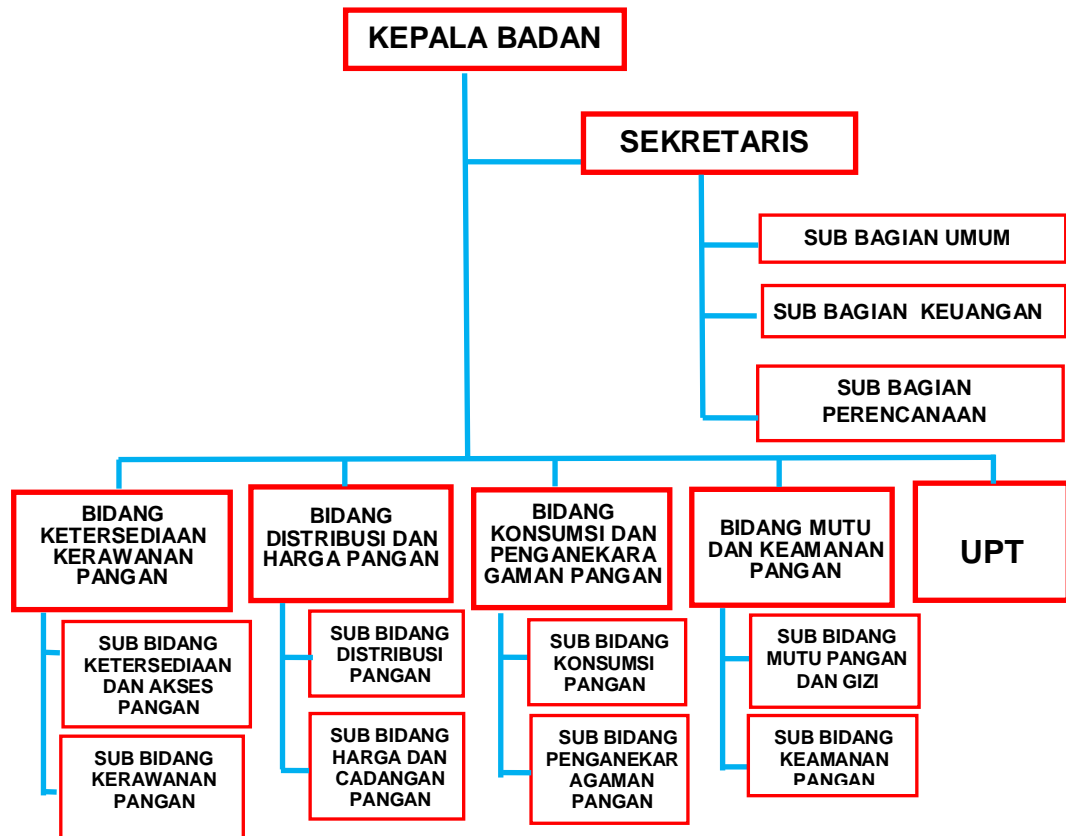
1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembiayaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di dibidang ketahanan pangan;

5. Pengelolaan administrasi

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung menurut Peraturan Daerah 3 Tahun 2014 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung**



b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan; dan
5. Pengelolaan administratif.

c. Unit Pelaksana Teknis

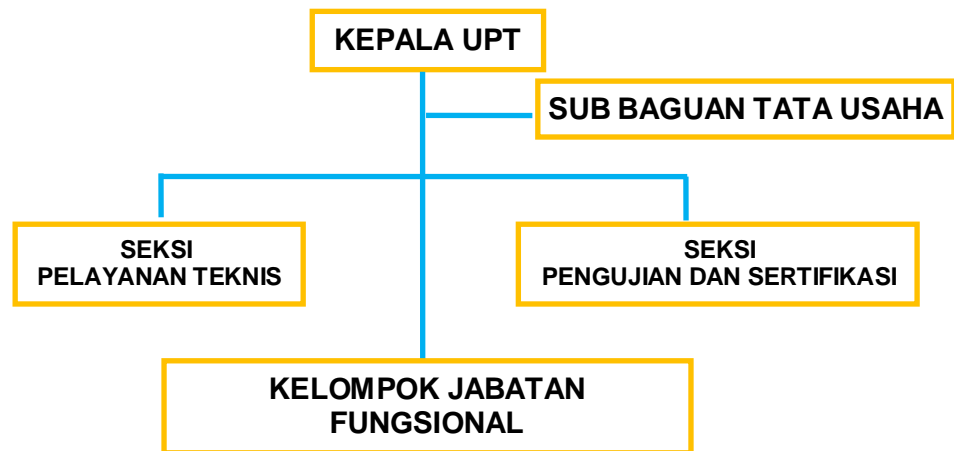
Selanjutnya pada tahun 2011 melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung merasa perlu untuk membentuk UPT ini karena memperhatikan lingkungan hidup, dan adanya perkembangan kesadaran masyarakat akan keamanan pangan serta tuntutan perdagangan pangan hasil pertanian. UPT dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengawasan mutu dan keamanan produk segar hasil pertanian;
2. Pelayanan sertifikasi dan labelisasi produk segar hasil pertanian;
3. Pelayanan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
5. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :

Struktur Organisasi
UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Pada
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung



Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Dewan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan daerah pada khususnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Maka melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 tanggal 2 April Tahun 2008 dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Dalam peraturan ini Gubernur berkedudukan sebagai Ketua dan Wakil Gubernur sebagai Ketua Harian. Selanjutnya Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor

25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional ;
- 2) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
2. Koordinasi dan sinergisitas lintas sektor dan seluruh *stake holder* dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
3. Fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui forum koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. Mengembangkan jaringan dan sisitem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan wilayah;
5. Koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Gubernur selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja Ahli (Pokja Ahli) dan Kelompok Kerja Teknis (Pokja Teknis) dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/150/II.05/HK/2008 yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/II.05/HK/2013 tentang pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Sedangkan pembentukan tim sekretariat DKP Provinsi Lampung dengan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 821/140/II.05/HK/2011 kemudian diperbaharui melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 821/570.a/II.05/2013 tentang Perubahan Penetapan Tim Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Provinsi Lampung Tahun 2013. Sekretariat DKP Provinsi Lampung berada pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dimana Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ditunjuk sebagai Sekretaris DKP Provinsi Lampung.

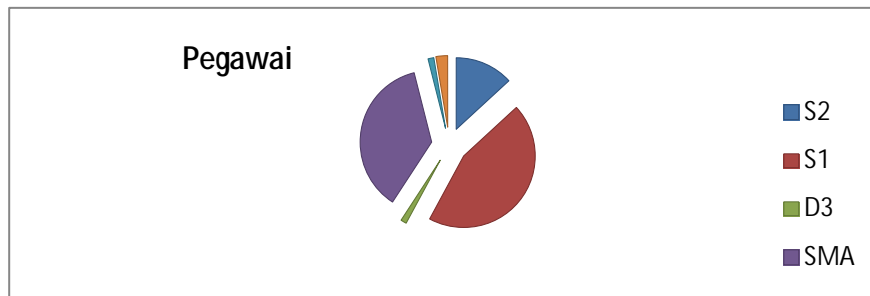
2.2. Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya Manusia

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia di tahun 2014 sebanyak 71 orang dan tahun 2013 sebanyak 76 orang. Terdiri dari 21 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 14 orang eselon IV dan 50 orang staf di tahun 2014 dan 55 orang staf ditahun 2013, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut :

PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2013	JUMLAH PEGAWAI TAHUN 2014
IV/c	1	1
IV/b	2	4
IV/a	4	6
III/d	17	16
III/c	5	9
III/b	16	22
III/a	11	7
II/d	4	3
II/c	1	4
II/b	6	5
I/c	-	-
I/d	-	-

Tingkat Kepangkatan PNS Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun



Tingkat Pendidikan PNS Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun

B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Bangunan gedung 2 (tiga) lantai di Komplek Kantor Gubernur Lampung, 1 (satu) gedung kantor, 1 Ruang Sekretariat dan 4 Ruang Bidang dan 1 Ruang UPTD, 1 Ruang rapat kecil kapasitas kurang lebih 50 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1.	Lemari besi	7	7	-	-
2.	Meja 1 biro	12	12	-	-
3.	Meja ½ biro	50	50	-	-
4.	Meja rapat besar	2	2	-	-
5.	Wireles	2	2	-	-
6.	Lemari Arsip	6	6	-	-
7.	AC 1 PK	20	20	-	-
8.	Meja Rapat	15	14	-	-
9.	Kursi rapat	100	100	-	-
10.	Audio Aplifire	1	1	-	-
11.	Laptop	5	5	-	-
12.	Handycam	2	2	-	-
13.	TV 21'	3	3	-	-
14.	TV 29'	1	1	-	-
15.	Printer	11	11	-	-
16.	Kursi putar ½ biro	66	66	-	-
17.	Sofa Tamu	5	5	-	-
18.	Mobil	2	2	-	-
19.	LCD	3	3	-	-
20.	Kamera Digital	5	5	-	-
21.	Komputer PC	8	8	-	-
22.	Kulkas besar	1	1	-	-
23.	Kulkas kecil	2	2	-	-
24.	Filling Kabinet	10	10	-	-
25.	Rak Buku	2	2	-	-
26.	Mesin Fax	2	2	-	-
27.	Instalasi Telpon	-	-	-	-

28.	Mesin Tik	4	4	-	-
29.	Scaner	1	1	-	-
30.	Lemari alat Lab	1	1	-	-
31.	Meja Pelayanan	1	1	-	-
32.	Sound system	1	1	-	-
33.	Layar/screen	1	1	-	-

C. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan di Provinsi Lampung, program/kegiatan ketahanan pangan dibiayai oleh dana APBN dan APBD. Rincian kegiatan di Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Ketahanan Pangan 2010 – 2014

PROGRAM	2010	2011	2012	2013	2014
APBD (Rp)					
Administrasi Perkantoran	2.482.460.000	555.208.000	632.160.000	735.845.000	646.475.000
Sarana & Prasarana	536.938.000	229.000.000	95.000.000	88.982.000	520.450.000
Disiplin Aparatur	65.000.000	46.015.000	60.000.000	72.000.000	0
Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	42.000.000	34.656.000	200.000.000	101.395.000	520.450.000
Diversifikasi & Ketahanan Pangan	4.019.733.000	3.845.121.000	3.812.840.000	6.801.778.000	123.320.000
Total APBD	7.188.131.000	4.710.000.000	4.800.000.000	7.800.000.000	4.385.731.000
APBN Dekonsentrasi (Rp)					
Diversifikasi & Ketahanan Pangan	8.160.000.000	10.536.243.000	16.014.700.000	14.985.558.000	9.142.067.000
APBN/TP (Rp)					
Diversifikasi & Ketahanan Pangan	1.011.100.000	2.616.700.000	-	275.000.000	-
Total APBN	9.171.100.000	13.152.943.000	16.014.700.000	15.260.558.000	9.142.067.000

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran

kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Badan Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung Tahun 2010 - 2014

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target SPM 2015 (%)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Terlaksananya administrasi perkantoran & tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang berkualitas	-	340 org	12 bln	60	70	70	70	70	60	70	70	70	70	100	100	100	100	100
2.	Jumlah regulasi ketahanan pangan	-	1 reg	1 PerGub	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3.	Ketersediaan pangan utama (energi dan protein)	-	2200 kkal/kap/hr 57 gr/kap/hr	-	2200 57	2200 57	2200 57	2200 57	2200 57	2612,74 68,75	2578,28 66,41	2870,04 58,31	2911,84 68,23	2.987,84 68,23	118,76 120,61	117,19 116,51	130,45 102,30	132,35 119,70	135,8 98,07
4.	Ketersediaan penguatan cadangan pangan	60	200 ton	-	40	40	40	40	40	47,7	46,51	71,3	46,51	19,88	119,25	116,28	178,25	116,28	49,70
5.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis	100	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Presentase peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat	60	5%	1%/thn	1%	1%	1%	1%	1%	1,28	2,36	0,4	1,32	0,11	128	236	40	132	11
7.	Jumlah sumber daya manusia yang terbina/terlatih	-	340 org	-	60	70	70	70	70	60	70	70	70	70	100	100	100	100	100
8.	Peningkatan Pola Pangan Harapan	90	93,3	93,3	87,3	88,1	89,8	91,5	93,3	86,8	89,2	90,2	84,3	85,4*	99,43	101,24	100,44	92,13	91,53
9.	Penurunan konsumsi beras 1,5% per tahun	-	109,2 kg/kap/thn	-	117,3	115,8	114,1	112,5	110,8	116,1	114,5	112,8	111,2	109,5*	98,97	98,88	98,86	98,84	98,83
10.	Pengawasan & pembinaan keamanan pangan	80	72 sertifikat	72 jenis	5	5	7	25	30	10	7	13	100	25	200	140	260	333,33	83

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung Tahun 2010 - 2014

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Presentase peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat	368.455.000	319.000.000	219.000.000	700.000.000	325.000.000	358.250.250	268.513.500	217.302.000	648.896.300	321.844.000	97	84	99	93	99	4,84	1,3
Ketersediaan penguatan cadangan pangan	500.000.000	435.000.000	590.000.000	275.000.000	211.995.000	499.119.000	430.956.500	588.111.475	273.521.225	209.765.700	100	99	100	99	99	(19,5)	(19,8)
Ketersediaan pangan utama (energi dan protein)	702.845.000	652.845.000	825.000.000	1.225.000.000	647.385.000	475.409.000	655.764.500	807.503.000	1.199.930.300	643.650.975	68	100	98	98	99	15,33	59,1
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis'	238.695.000	238.695.000	575.600.000	835.000.000	100.000.000	215.129.000	223.471.500	566.879.000	821.747.000	97.768.900	90	94	98	98	98	66,6	79
Peningkatan Pola Pangan Harapan	199.905.000	159.905.000	92.240.000	100.000.000	93.652.000	198.192.000	144.157.000	89.287.500	95.728.000	87.962.800	99	90	97	96	94	(35,4)	(38)
Penurunan konsumsi beras 1,5% per tahun	776.964.000	892.476.000	486.000.000	1.263.865.000	455.000.000	754.921.905	888.063.500	472.960.300	1.167.810.405	454.286.200	97	100	97	92	100	(0,4)	(1)
Pengawasan & pembinaan keamanan pangan	932.869.000	947.200.000	685.000.000	2.140.000.000	1.135.000.000	906.817.755	854.757.300	666.969.200	1.977.950.000	1.081.829.950	97	90	97	92	95	25,2	21,1
Jumlah regulasi ketahanan pangan	300.000.000	200.000.000	340.000.000	262.913.000	127.454.000	294.371.000	189.660.700	316.481.000	244.692.000	127.216.800	98	95	93	93	100	(18,0)	(20)
Terlaksananya administrasi perkantoran dan tersedianya sarana prasarana perkantoran yang berkualitas	3.126.398.000	818.864.000	927.160.000	926.222.000	1.290.245.000	3.225.808.784	765.054.237	780.711.448	800.701.694	1.229.167.470	103	93	84	86	95	(54,6)	(57,9)
Jumlah sumberdaya manusia yang terbina/terlatih	42.000.000	46.015.000	60.000.000	72.000.000	-	41.750.000	45.503.700	58.910.500	71.632.200	-	99	99	98	99	-	4,8	4,3

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Badan Ketahanan Pangan dari seluruh indikator kinerja kegiatan secara fisik lebih dari 100% atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Sangat Baik. Adapun capaian kinerja strategis tahun 2010-2014 disajikan pada di atas. Secara umum, kondisi ketahanan pangan Lampung 2010-2014 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif.
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Lampung bahkan penguatan cadangan pangan masyarakat telah melebihi standar pelayanan minimal.
- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan.
- d. Pola konsumsi pangan masyarakat semakin baik dan telah terbentuk kesadaran penganekaragaman konsumsi masyarakat mengkonsumsi pangan selain beras, hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya tingkat konsumsi beras setiap tahunnya, walaupun pola pangan harapan masyarakat terjadi penurunan di tahun 2013.
- e. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

A. Ketersediaan Pangan di Provinsi Lampung

1. Produksi

Produksi pangan merupakan aspek penting dalam kehidupan karena terkait erat dengan ketahanan pangan. Produksi padi mengalami peningkatan, yakni dari 2.673.844 ton pada tahun 2009 menjadi 3.207.002 ton di tahun 2013, sedangkan komoditi jagung mengalami penurunan, yakni dari 2.067.710 ton pada tahun 2009 menjadi 1.760.278 ton di tahun 2013. Komoditi ubi kayu mengalami peningkatan dari sebesar 7.569.178 ton menjadi 8.329.201 ton di tahun 2013.

a. Produksi Tanaman Pangan

1) Provinsi

Perkembangan komoditi tanaman pangan Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik dalam hal produksi, luas panen maupun produktivitas. Gambaran perkembangan komoditi Tanaman Pangan selama 5 tahun terakhir (2009 – 2013) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Perkembangan Produksi tanaman pangan Provinsi Lampung dari tahun 2009-2013 (ton)

No.	Komoditi	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Padi Sawah	2.487.314	2.623.873	2.752.869	2.908.600	3.042.419
2.	Padi Ladang	186.530	183.803	187.926	192.855	164.583
3.	Jagung	2.067.710	2.126.571	1.817.906	1.760.275	1.760.278
4.	Ubi Kayu	7.569.178	8.637.594	9.193.676	8.387.351	8.329.201
5.	Ubi Jalar	45.041	44.920	47.239	47.408	45.141
6.	KacangTanah	11.090	17.617	12.911	10.694	10.676
7.	Kacang Hijau	3.863	3.524	3.645	3.212	2.643
8.	Kedelai	16.153	7.325	10.984	7.993	6.156

Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Tabel 2. Perkembangan Luas Panen tanaman pangan Provinsi Lampung dari tahun 2009-2013 (Ha)

No.	Komoditi	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Padi Sawah	506.596	528.377	543.943	577.246	584.479
2.	Padi Ladang	63.821	62.231	63.030	64.630	53.611
3.	Jagung	434.542	447.509	380.917	360.264	346.315
4.	Ubi Kayu	309.047	346.217	368.096	324.749	318.107
5.	Ubi Jalar	4.626	4.612	4.848	4.849	4.630
6.	KacangTanah	8.667	13.967	10.148	8.420	8.305
7.	Kacang Hijau	4.325	3.935	4.071	3.576	2.941
8.	Kedelai	13.518	6.195	9.232	6.708	4.986

Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Selama periode tahun 2009-2013, produksi padi Provinsi Lampung memperlihatkan tren positif. Produksi padi terendah terjadi tahun 2009 yaitu 2.673.844 ton gabah kering giing (GKG) dan tertinggi tahun 2013 yang mencapai 3.207.002 ton GKG. Secara rata-rata, produksi padi mengalami peningkatan 4,0% atau sekitar 106.631.6 ton GKG. Kenaikan produksi padi pada periode tersebut relatif bervariasi di mana kenaikan produksi tertinggi terjadi tahun 2012, yaitu 160.660 ton GKG atau naik 5,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan luas panen bertambah 33.303 hektar. Ditahun 2013, produksi padi mencapai 3.207.002 ton GKG atau mengalami

peningkatan 105.547 ton GKG (3,4%) dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 luas panen mengalami penurunan dibanding tahun 2012, meskipun luas panen mengalami penurunan tapi ternyata hasil produksinya meningkat, hal ini karena produktivitas pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Untuk Padi sawah produktivitas tahun 2013 mencapai 6 ton/ha, sementara tahun 2012 produktivitas baru mencapai 5 ton/ha. Peningkatan produktivitas ini tidak lepas dari peranan pemerintah dalam budidaya, diantaranya pendampingan dan bimbingan dari penyuluh lapangan sehingga petani bisa memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal. Sementara untuk produktivitas padi ladang tidak mengalami peningkatan, produktivitasnya tetap yaitu 3 ton/ha. Produksi padi Provinsi Lampung pada tahun 2013 merupakan penyumbang produksi nasional nomor 7. Produksi jagung pada tahun 2010 mengalami peningkatan produksi

Tabel 3. Produksi Padi Sawah se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	153.144	160.080	165.342	177.810	116.607
2.	Tanggamus	306.716	208.553	201.067	212.317	226.628
3.	Lampung Selatan	338.988	370.06	395.437	399.900	441.113
4.	Lampung Timur	417.521	431.981	443.552	492.315	509.949
5.	Lampung Tengah	550.253	570.968	654.545	660.443	673.564
6.	Lampung Utara	108.471	117.088	131.155	139.319	150.339
7.	Way Kanan	135.751	120.487	145.472	137.161	151.674
8.	Tulang Bawang	324.412	187.412	186.728	185.674	186.781
9.	Pesawaran	119.971	139.159	146.317	150.526	153.472
10.	Pringsewu ¹	*	111.239	1	113.342	120.275
11.	Mesuji ²	*	113.822	87.195	144.304	129.791
12.	Tulang Bawang Barat ²	*	60.245	49.155	66.182	73.473
13.	Pesisir Barat ³	*	*	*	*	72.506
14.	Bandar Lampung	9.039	9.336	8.631	6.752	9.220
15.	Metro	23.048	23.443	24.988	22.555	27.027
Jumlah		2.487.314	2.623.873	2.752.868	2.908.600	3.042.419

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

dari 2.067.710 pada tahun 2009 menjadi 2.126.571 pada tahun 2010, dan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2011 sebesar 7,2%, tahun 2012 sebesar 10,7%, dan tahun 2013 produksinya mengalami kenaikan meski kecil. Penurunan produksi ini dikarenakan adanya musim kemarau yang ekstrem dan adanya alih fungsi lahan. Namun demikian produksi jagung Provinsi

Lampung masih menjadi penyumbang nomor 3 untuk produksi nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Produksi ubi kayu Provinsi Lampung merupakan penyumbang nomor 1 untuk produksi nasional.

2) Kabupaten

Tabel 4. Produksi Tanaman Padi Ladang di Kabupaten se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	6.339	10.377	10.511	10.132	164
2.	Tanggamus	6.992	5.892	6.537	8.876	5.915
3.	Lampung Selatan	26.062	23.562	28.840	29.065	29.972
4.	Lampung Timur	18.020	17.681	16.807	17.411	16.264
5.	Lampung Tengah	58.041	52.811	46.399	50.710	45.638
6.	Lampung Utara	30.906	36.201	35.681	30.669	24.807
7.	Way Kanan	24.146	23.934	28.919	24.552	18.890
8.	Tulang Bawang	11.931	4.358	4.842	5.767	2.925
9.	Pesawaran	3.830	3.700	5.702	5.531	6.451
10.	Pringsewu ¹⁾	-	679	988	6.321	684
11.	Mesuji ²⁾	-	905	535	1.053	190
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	3.503	2.042	2.644	2.642
13.	Pesisir Barat ³⁾	-	-	-	-	9.915
14.	Bandar Lampung	181	200	123	124	84
15.	Metro	82	0	0	0	43
		186.530	183.803	187.926	192.855	164.584

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 5. Produksi Tanaman Jagung di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	13.459	20.092	16.040	16.488	1.001
2.	Tanggamus	65.294	22.393	20.226	31.340	9.916
3.	Lampung Selatan	518.667	557.444	539.522	529.028	597.080
4.	Lampung Timur	621.254	644.243	442.579	481.635	522.776
5.	Lampung Tengah	516.183	514.994	476.112	373.276	293.763
6.	Lampung Utara	140.744	149.554	146.834	122.103	125.351
7.	Way Kanan	61.196	62.988	72.286	70.972	64.525
8.	Tulang Bawang	52.116	11.557	6.495	7.114	7.484
9.	Pesawaran	74.455	81.268	56.169	90.555	5.392
10.	Pringsewu ¹⁾	-	42.243	27.132	28.102	31.997
11.	Mesuji ²⁾	-	5.414	9.510	2.209	922
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	10.748	2.866	5.749	7.389
13.	Pesisir Barat ³⁾	-	-	-	-	20.048
14.	Bandar Lampung	713	545	268	985	380
15.	Metro	3.629	3.088	1.865	719	2.254
Jumlah		2.067.710	2.126.571	1.817.906	1.760.275	1.760.278

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 6. Produksi Tanaman Kedelai di Kabupaten se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	645	139	192	107	33
2.	Tanggamus	4.194	1.150	2.554	778	130
3.	Lampung Selatan	2.017	1.241	694	1.734	789
4.	Lampung Timur	1.431	716	1.341	1.060	1.585
5.	Lampung Tengah	2.897	1.557	2.397	1.824	987
6.	Lampung Utara	2.124	1.162	1.397	1.079	1.101
7.	Way Kanan	1.279	868	1.870	1.103	1.265
8.	Tulang Bawang	461	247	14	77	10
9.	Pesawaran	930	50	301	102	139
10.	Pringsewu ¹⁾	-	78	202	20	24
11.	Mesuji ²⁾	-	10	9	97	10
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	93	4	4	-
13.	Barat ²⁾	-	-	-	-	64
14.	Pesisir Barat ³⁾	125	0	0	0	-
15.	Bandar Lampung Metro	50	14	9	8	19
Jumlah		16.153	7.325	10.984	7.993	6.156

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 7. Produksi Tanaman Ubi Kayu di Kabupaten se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	13.298	13.298	14.863	13.680	5.694
2.	Tanggamus	19.206	19.206	16.396	12.270	13.849
3.	Lampung Selatan	136.602	138.416	283.225	214.730	210.175
4.	Lampung Timur	897.411	1.058.097	1.360.303	1.236.925	1.342.254
5.	Lampung Tengah	2.793.383	3.287.511	3.183.153	3.371.618	2.968.247
6.	Lampung Utara	1.231.960	1.293.039	1.281.005	1.357.275	1.556.199
7.	Way Kanan	389.868	384.706	388.290	373.832	448.207
8.	Tulang Bawang	2.023.958	844.058	847.575	532.395	570.405
9.	Pesawaran	43.460	53.976	76.833	71.001	86.429
10.	Pringsewu ¹⁾	-	26.882	19.125	12.850	13.606
11.	Mesuji ²⁾	-	322.629	301.219	126.661	120.778
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	1.189.859	1.416.060	1.058.194	982.294
13.	Pesisir Barat ³⁾	-	-	-	-	4.643
14.	Bandar Lampung	3.802	3.802	3.579	3.390	4.234
15.	Metro	2.115	2.115	2.050	2.530	2.187
Jumlah		7.569.178	8.637.594	9.193.676	8.387.351	8.329.201

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 8. Produksi Tanaman Ubi Jalar di Kabupaten se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	4.459	4.857	6.455	8.048	4.671
2.	Tanggamus	6.461	4.535	5.313	4.697	4.688
3.	Lampung Selatan	5.370	4.031	3.655	6.091	3.344
4.	Lampung Timur	4.226	3.622	4.292	3.793	4.348
5.	Lampung Tengah	8.871	9.851	11.225	10.203	8.020
6.	Lampung Utara	7.167	8.653	6.730	6.028	6.763
7.	Way Kanan	2.937	2.760	3.108	2.522	1.835
8.	Tulang Bawang	3.758	1.484	1.751	1.295	1.458
9.	Pesawaran	931	1.400	1.639	1.571	1.418
10.	Pringsewu ¹⁾	-	513	733	846	5.355
11.	Mesuji ²⁾	-	809	539	502	734
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	1.551	1.176	1.168	1.082
13.	Barat ²⁾	-	-	-	-	793
14.	Pesisir Barat ³⁾	647	530	401	375	276
15.	Bandar Lampung Metro	214	324	222	269	356
J u m l a h		45.041	44.920	47.239	47.408	45.141

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 9. Produksi Tanaman Kacang Tanah di Kabupaten se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	585	580	765	507	243
2.	Tanggamus	762	527	480	750	542
3.	Lampung Selatan	598	2.822	1.044	633	1.481
4.	Lampung Timur	1.162	1.024	1.149	632	826
5.	Lampung Tengah	3.086	3.001	2.379	2.415	2.707
6.	Lampung Utara	1.452	4.223	1.873	1.807	1.832
7.	Way Kanan	2.019	3.049	3.864	2.195	1.424
8.	Tulang Bawang	1.001	248	155	143	136
9.	Pesawaran	298	1.133	575	1.081	713
10.	Pringsewu ¹⁾	-	471	289	106	97
11.	Mesuji ²⁾	-	98	71	56	46
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	368	206	331	245
13.	Barat ²⁾	-	-	-	-	336
14.	Pesisir Barat ³⁾	52	42	31	27	34
15.	Bandar Lampung Metro	75	31	30	11	14
J u m l a h		11.090	17.617	12.911	10.694	10.676

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

**Tabel 10. Produksi Tanaman Kacang Hijau di Kabupaten se-
Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013**

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	86	88	90	84	7
2.	Tanggamus	399	245	245	179	149
3.	Lampung Selatan	381	280	410	363	297
4.	Lampung Timur	338	370	338	541	455
5.	Lampung Tengah	993	880	691	627	584
6.	Lampung Utara	568	724	610	514	449
7.	Way Kanan	661	572	931	699	397
8.	Tulang Bawang	228	72	52	52	55
9.	Pesawaran	170	108	71	50	86
10.	Pringsewu ¹⁾	-	33	149	38	16
11.	Mesuji ²⁾	-	70	16	18	14
12.	Tulang Bawang Barat ²⁾	-	50	28	30	25
13.	Barat ²⁾	-	-	-	-	100
14.	Pesisir Barat ³⁾	7	4	4	6	6
15.	Bandar Lampung Metro	32	28	10	11	4
J u m l a h		11.090	17.617	12.911	10.694	10.676

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Catatan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten Tanggamus

2) Masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang

3) Masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat

b. Perkembangan Produksi Hortikultura

Disamping produksi tanaman pangan Provinsi Lampung juga mempunyai potensi dalam memproduksi hortikultura yang terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Perkembangan produksi hortikultura sebagaimana tabel 11. berikut.

Tabel 11. Perkembangan Produksi Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2013

No.	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Cabe Besar	20.368	28.686	41.375	42.437	42.436
2.	Bawang Merah	291	368	705	416	220
3.	Tomat	17.489	20.330	18.471	16.801	22.392
4.	Manggis	2.751	6.583	6.033	6.698	3.714
5.	Nanas	442.431	469.034	505.336	585.608	722.620
6.	Pisang	681.871	677.781	687.761	817.606	984.297
7.	Durian	30.463	36.682	42.549	45.396	44.444
8.	Alpukat	9.257	9.864	11.546	10.886	9.722
9.	Pepaya	53.354	50.955	123.340	103.313	101.794
10.	Salak	5.409	7.364	7.229	6.265	4.078

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan produksi hortikultura Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung melalui UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian telah melakukan pembinaan melalui penerbitan sertifikasi Prima 3 pada beberapa komoditas hortikultura baik buah-buahan maupun sayuran.

Sampai tahun 2013 telah ada 124 sertifikat yang dikeluarkan untuk pelaku usaha dengan 11 komoditi (kencur Powder, Tomat, Wortel, Jambu Biji, Buah Naga, Buah Jeruk, Nanas, Pepaya, Pisang, Salak dan buah Manggis).

c. Perkembangan Produksi Peternakan

1). Jumlah Populasi Ternak

a).Provinsi

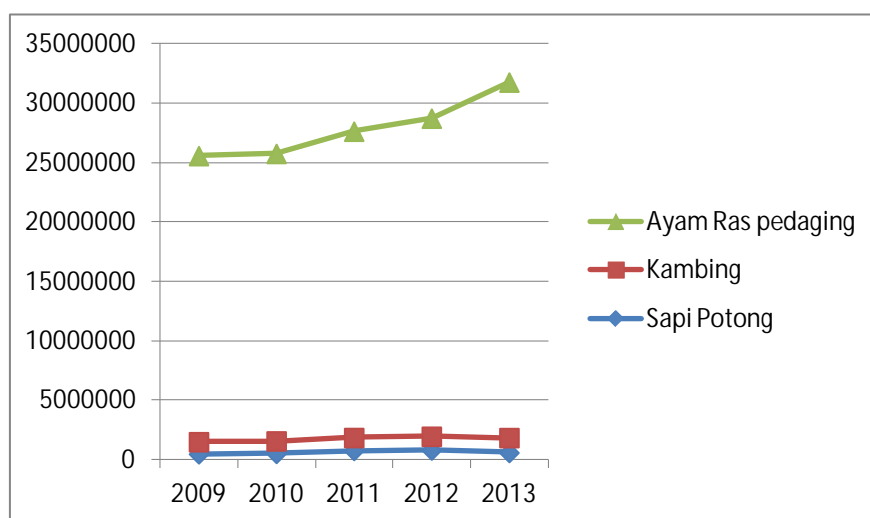
Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung ternak nasional dan masuk ketiga terbesar dalam penyuplai sapi potong tingkat nasional. Sebagai gambaran produksi ternak provinsi lampung tahun (2009 – 2013) dapat dilihat pada tabel 12. Berikut.

Tabel 12. Populasi Ternak di Prov. Lampung tahun 2009 – 2013

No.	Jenis Ternak	Produksi (ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Sapi Potong	463.032	496.066	742.776	778.050	573.483
2.	Kambing	1.015.700	1.050.330	1.090.647	1.159.543	1.253.153
3.	Ayam Ras Pedaging	24.087.464	24.203.461	25.788.858	26.782.929	29.931.232

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Grafik 1. Perkembangan Populasi Ternak di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2013



Melalui upaya program Peningkatan Populasi Ternak Perkembangan populasi sapi potong, Provinsi Lampung telah berhasil meningkatkan populasi sapi potong menjadi 778.050 ekor pada

tahun 2012. Sementara pada tahun 2013 jumlah populasi ternak sapi potong mengalami penurunan sebesar 26,29% dari tahun sebelumnya. Ternak ruminansia kecil tiap tahun mengalami peningkatan jumlah populasinya antara lain populasi Kambing menjadi 1.253.153 ekor pada tahun 2013. Demikian halnya untuk ternak unggas dimana populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan menjadi 29.931.232 ekor.

Secara nasional Provinsi Lampung merupakan penghasil ternak nomor 2 di Sumatera dan nomor 7 secara nasional dan sebagai pemasok kebutuhan daging Jabodetabek, Banten dan sebagian Sumatera. Saat ini Provinsi Lampung mempunyai ternak kambing khas Lampung yaitu **Kambing Saburai**.

b). Kabupaten

Tabel 13. Populasi Sapi Potong di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Populasi (ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	25.552	26.297	18.527	22.708	4.781
2.	Tanggamus	6.488	7.150	4.414	5.981	4.453
3.	Lampung Selatan	49.640	50.966	108.896	116.954	95.172
4.	Lampung Timur	80.806	95.823	152.170	159.779	100.636
5.	Lampung Tengah	150.401	163.019	288.449	294.430	226.003
6.	Lampung Utara	20.460	22.079	33.279	34.870	25.614
7.	Way Kanan	27.150	27.383	35.185	35.544	26.320
8.	Tulang Bawang	27.079	27.667	28.363	29.297	22.261
9.	Pesawaran	12.877	13.041	17.916	19.072	14.647
10.	Pringsewu	9.612	10.093	14.402	15.744	11.502
11.	Mesuji	14.468	15.891	9.358	10.655	7.692
12.	Tulang Bawang	34.837	33.048	24.484	25.220	14.366
13.	Barat	*	*	*	*	12.903
14.	Pesisir Barat	1.384	1.272	1.688	1.817	2.065
15.	Bandar Lampung Metro	2.278	2.337	5.645	5.979	5.068
Jumlah		463.032	839.321	742.776	778.050	573.483

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Catatan : *) Masih gabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 14. Populasi Kambing di Kabupaten/Kota Tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten	Populasi (ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	79.408	78.502	87.679	91.593	71.330
2.	Tanggamus	128.493	142.637	147.116	164.325	169.222
3.	Lampung Selatan	227.696	233.750	245.437	257.218	354.740
4.	Lampung Timur	107.725	117.421	127.988	134.387	137.181
5.	Lampung Tengah	127.915	129.890	131.562	146.912	148.070
6.	Lampung Utara	49.347	48.017	52.971	58.459	59.212
7.	Way Kanan	48.907	49.823	50.307	51.071	51.848
8.	Tulang Bawang	62.955	56.456	50.614	45.489	25.987
9.	Pesawaran	27.986	28.221	28.787	29.943	29.714
10.	Pringsewu	59.533	66.976	72.133	78.553	82.866
11.	Mesuji	25.457	27.792	27.108	28.261	29.391
12.	Tulang Bawang Barat	55.421	55.146	54.569	57.998	61.238
13.	Pesisir Barat	*	*	*	*	18.548
14.	Bandar Lampung	6.177	5.763	4.834	5.305	5.215
15.	Metro	8.680	9.936	9.542	10.029	8.591
Jumlah		1.015.700	1.050.330	1.090.647	1.159.543	1.253.153

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Catatan : *) Masih gabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 15. Populasi Ayam Ras Pedaging di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2009 – 2013

No	Kabupaten	Populasi (ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	-	-	-	-	-
2.	Tanggamus	42.373	106.000	106.000	110.000	114.301
3.	Lampung Selatan	13.970.292	14.104.993	14.810.243	14.958.345	15.680.392
4.	Lampung Timur	513.266	1.937.700	2.034.585	2.136.314	2.268.278
5.	Lampung Tengah	703.789	1.057.818	1.008.168	1.125.544	1.245.663
6.	Lampung Utara	1.250.300	1.205.000	1.226.222	1.309.235	1.229.643
7.	Way Kanan	503.817	478.585	909.273	519.084	539.171
8.	Tulang Bawang	151.656	299.739	413.640	537.732	246.082
9.	Pesawaran	2.357.185	131.145	131.773	453.952	3.275.363
10.	Pringsewu	2.848.742	3.010.060	3.166.583	3.348.345	3.538.239
11.	Mesuji	7.500	8.235	15.000	168.999	50.000
12.	Tulang bawang Barat	447.844	368.207	486.422	510.742	484.100
13.	Pesisir Barat	*	*	*	*	2.000
14.	Bandar Lampung	426.700	624.894	382.149	258.887	48.000
15.	Metro	864.000	871.085	1.098.800	1.345.750	1.210.000
Jumlah		24.087.464	24.203.461	25.788.858	26.782.929	29.931.232

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Catatan : *) Masih gabung dengan Kabupaten Lampung Barat

2). Produksi Daging Ternak, Telur dan Susu

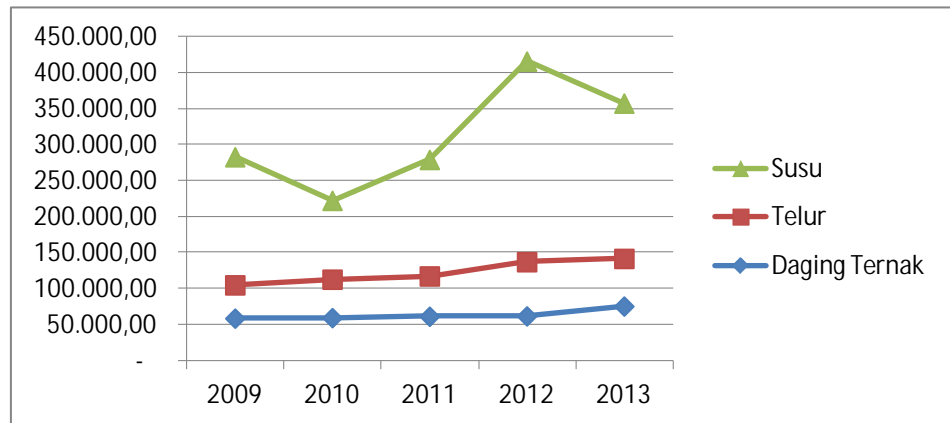
a) Provinsi

Tabel 16. Produksi Daging Ternak, Telur dan Susu di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Jenis Ternak	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Daging Ternak	58.449,15	59.200,05	61.088,08	61.574,82	75.281,90
2.	Telur	46.304,97	53.415,23	56.054,88	75.396,78	66.209,06
3.	Susu (Liter)	178.070	109,574	161.945	278.790	215.941

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Grafik 2. Produksi Daging, Telur dan Susu di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2013



b) Kabupaten

Tabel 17. Produksi Daging Ternak di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	1.295,50	528,98	505,12	500,56	2.044,96
2.	Tanggamus	2.624,89	3.395,89	2.316,03	2.249,33	922,16
3.	Lampung Selatan	9.038,18	2.086,88	1.567,59	9.077,28	28.117,05
4.	Lampung Timur	5.280,60	3.085,23	485,44	5.161,74	8.546,90
5.	Lampung Tengah	6.844,15	14.308,94	7.269,11	6.766,29	5.464,46
6.	Lampung Utara	3.194,51	4.496,64	5.963,24	3.030,78	3.422,55
7.	Way Kanan	2.367,35	2.115,84	2.644,73	2.633,20	4.315,87
8.	Tulang Bawang	1.948,61	1.351,35	1.197,84	790,55	1.149,70
9.	Pesawaran	10.440,72	9.446,25	9.637,29	9.866,32	5.883,64
10.	Pringsewu	2.079,67	2.086,58	3.889,54	3.026,88	5.951,39
11.	Mesuji	1.085,99	3.426,87	4.014,98	2.057,09	644,81
12.	Tulang Bawang Barat	963,11	811,87	1.433,86	1.504,99	1.845,90
13.	Pesisir Barat	*	*	*	*	923,38
14.	Bandar Lampung	9.435,24	10.056,48	11.284,20	12.527,43	3.190,91
15.	Metro	1.850,54	2.002,25	2.382,38	2.382,38	2.858,22
Jumlah		58.449,06	59.200,05	54.591,35	61.574,82	75.281,90

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Catatan : *) Masih gabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 18. Produksi Telur di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung tahun 2009- 2013

No	Kabupaten	Populasi (ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	591,73	1.140,34	808,24	1.292,00	1.412,14
2.	Tanggamus	1.626,90	1.128,50	677,33	654,36	684,73
3.	Lampung Selatan	27.753,48	28.248,13	29.184,19	30.084,16	32.636,68
4.	Lampung Timur	3.597,93	7.830,30	11.857,60	14.408,73	14.782,32
5.	Lampung Tengah	3.973,08	4.665,68	4.956,95	20.032,75	5.033,39
6.	Lampung Utara	988,70	1.339,21	1.328,04	1.420,02	1.522,51
7.	Way Kanan	1.360,66	1.691,45	1.939,78	1.826,64	2.260,22
8.	Tulang Bawang	1.266,99	965,28	848,49	836,45	534,97
9.	Pesawaran	2.005,31	1.138,45	389,52	770,50	1.658,66
10.	Pringsewu	1.164,43	2.905,91	2.097,47	2.233,87	3.006,90
11.	Mesuji	149,85	299,53	210,90	220,48	514,64
12.	Tulang Bawang Barat	407,80	569,18	603,34	659,50	611,51
13.	Pesisir Barat	*	*	*	*	187,39
14.	Bandar Lampung	418,46	438,86	303,79	202,17	771,69
15.	Metro	999,65	1.054,40	849,23	755,16	591,31
Jumlah		45.886,51	53.415,22	56.054,87	75.396,79	66.209,06

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

Catatan : *) Masih gabung dengan Kabupaten Lampung Barat

Tabel 19. Produksi Susu di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Populasi (ekor)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Lampung Barat	12,09	16,11	16,11	107,16	96,69
2.	Tanggamus	62,84	33,84	20,14	83,80	72,52
3.	Lampung Selatan	-	-	32,23	33,84	-
4.	Lampung Timur	-	-	2,42	-	-
5.	Lampung Tengah	25,78	-	22,56	-	3,22
6.	Lampung Utara	-	-	-	-	-
7.	Way Kanan	-	-	-	-	-
8.	Tulang Bawang	-	-	-	-	-
9.	Pesawaran	-	-	-	-	-
10.	Pringsewu	-	-	-	-	-
11.	Mesuji	-	-	806	-	-
12.	Tulang Bawang Barat	4,03	-	5,64	8,06	-
13.	Pesisir Barat	-	-	-	-	-
14.	Bandar Lampung	1,61	1,61	-	-	-
15.	Metro	71,71	58,01	62,04	45,93	43,51
Jumlah		178,06	109,57	967,14	278,79	215,94

Sumber Data : Dinas Peternakan Provinsi Lampung

d. Perkembangan Produksi Perikanan

Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan memegang peranan yang sangat penting di Provinsi Lampung, mengingat luas perairan laut (12 mil) mencapai 24.820,0 Km² (41,2%), luas wilayah Pesisir sebesar 440.010 Hektar, panjang garis pantai 1.105 Kilometer, 2 buah teluk besar (teluk Semangka dan teluk Lampung) dan terdapat jumlah pulau-pulau kecil

sebanyak 132 buah. Total produksi perikanan di Provinsi Lampung tahun 2013 sebesar 169.360,85 (produsen 10 besar nasional) mengalami peningkatan sebesar 12,7% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu sekitar 65% potensi produksi udang nasional berasal dari Provinsi Lampung. Nilai ekspor produk hasil perikanan mencapai US\$ 291.442.519,23 pada Tahun 2013 yang didistribusikan ke berbagai negara tujuan, antara lain Amerika Serikat (55,10%), Jepang (18,80%), Belanda (12%), Inggris (8,4%) dan kurang dari 5 % ke beberapa negara lainnya.

Tabel 20. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Lampung 2009 – 2013.

No	Uraian	Produksi (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Tangkap	173.440,5	150.847,63	162.007,20	150.342,95	169.360,85
2.	Budidaya	106.991,21	94.249,28	120.442,41	120.756,22	152.539,39

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan

Hasil produksi ikan Provinsi Lampung berlimpah tapi ternyata tingkat konsumsi ikan penduduk Lampung masih berada di bawah tingkat konsumsi ikan nasional, meskipun tiap tahunnya menunjukkan trend naik. Melihat kondisi konsumsi ikan penduduk yang masih rendah, kiranya Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) perlu di lanjutkan untuk memacu peningkatan konsumsi ikan dimasyarakat.

e. Perkembangan Produksi Perkebunan

Pengembangan komoditi perkebunan menempati prioritas tinggi dalam pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Lampung karena sub sektor ini menjadi sumber penghasil devisa. Perkembangan produksi perkebunan dapat di lihat pada Tabel 21 berikut :

Tabel 21. Perkembangan Produksi Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kelapa Dalam	104.833	110.001	116.925	111.859	109.790
2.	Karet	57.938	71.833	70.188	75.368	74.614
3.	Kelapa Sawit	364.862	370.606	390.906	442.037	423.987
4.	Tebu	798.885	744.302	658.338	772.989	550.770
5.	Lada	22.311	22.344	24.498	24.407	23.809
6.	Kopi Robusta	145.191	145.009	144.516	134.700	133.243
7.	Kakao	26.046	26.564	30.509	31.953	30.907

Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Tabel 22. Perkembangan Produksi Perkebunan Rakyat (PR) di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kelapa	104.770	110.001	116.925	111.859	109.790
2.	Dalam	33.144	43.946	45.240	52.443	51.561
3.	Karet	162.847	162.953	167.820	171.964	168.901
4.	Kelapa Sawit	99.473	66.704	53.601	50.100	40.203
5.	Tebu	22.311	22.344	24.498	24.407	23.809
6.	Lada	145.191	145.009	144.516	134.700	133.243
7.	Kopi	22.009	22.425	27.249	28.521	27.846
	Robusta					
	Kakao					

Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Tabel 23. Perkembangan Produksi Perkebunan Besar Negara (PBN) di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Karet	18.491	19.055	15.906	13.454	14.390
2.	Kelapa Sawit	33.755	34.210	27.989	39.652	35.662
3.	Tebu	44.521	42.564	44.262	71.092	45.904
4.	Kakao	0	25	24	23	25

Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Tabel 24. Perkembangan Produksi Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

No.	Komoditas	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kelapa Dalam	63	-	-	-	-
2.	Karet	6.303	8.832	9.042	9.471	8.663
3.	Kelapa Sawit	168.260	173.443	195.097	230.421	219.424
4.	Tebu	654.891	635.034	560.475	651.797	464.663
5.	Kakao	4.037	4.114	3.236	3.409	3.036

Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

Dalam bidang ketahanan pangan, tebu menjadi komoditas yang sangat penting. Budidaya Tanaman tebu di Provinsi Lampung diusahakan sebagian besar oleh perusahaan perkebunan. Dalam prosesnya mereka melibatkan masyarakat untuk berperan aktif melalui program TIR dan plasma tebu. Dengan adanya program ini maka produksi tebu akan terus dapat ditingkatkan dan keamanan produksi perkebunan dapat terus dijaga. Pertanaman tebu di Provinsi Lampung adalah secara nasional adalah yang terbaik. Hal ini ditandai dengan rendeman tebu di Provinsi Lampung mencapai 8,82 % bila dibandingkan dengan rendeman nasional 6,47 %. Produksi tebu Lampung memberi kontribusi terhadap produksi nasional 37%.

2. Neraca Bahan Makanan

Ketersediaan pangan sebagai salah satu sub sistem ketahanan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Sebagai gambaran ketersediaan bahan makanan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 25 dibawah ini :

Tabel 25. Ketersediaan Bahan Makanan Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014*

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014*
I	Pangan Nabati						
1.	Beras	1.514.814	1.432.074	1.666.050	1.757.069	1.816.864	1.881.047
2.	Jagung	1.840.262	1.892.648	1.617.936	1.566.645	1.566.647	1.619.405
3.	Kedelai	15.345	6.959	10.435	7.593	5.848	12.893
4.	Kacang Tanah	10.536	16.736	12.265	10.159	10.142	9.275
5.	Kacang Hijau	3.593	3.277	3.398	2.987	2.458	2.396
6.	Ubi Kayu	6.433.801	7.341.955	7.822.178	7.129.248	7.079.821	8.266.543
7.	Ubi Jalar	39.636	39.530	42.613	41.719	39.724	38.483
8.	Sayur	226.669	254.060	285.069	217.921	211.476	246.512
9.	Buah	1.361.309	1.395.020	2.169.480	1.564.898	1.952.532	1.808.458
10.	Minyak Goreng	34.180	55.109	92.634	143.540	47.700	498.027
11.	Gula Pasir	798.885	760.815	793.911	720.961	793.911	723.711
II.	Pangan Hewani						
1.	Daging	34.084	36.296	37.213	55.168	50.014	50.371
2.	Telur	34.231	44.878	40.473	89.122	99.827	63.330
3.	Susu	178,07	109,57	161,95	170	360	322
4.	Ikan	238.367	208.332	163.276	257.659	500.405	559.905

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 26 dibawah ini.

Tabel 26. Ketersediaan energi, protein dan lemak berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	Standar WNPG	Tahun 2009 (ATAP 2008)	Tahun 2010 (ATAP 2009)	Tahun 2011 (ATAP 2010)	Tahun 2012 (ATAP 2011)	Tahun 2013 (ATAP 2012)	Tahun 2014 (ATAP 2013)
1	Energi (kal/kap/hr)	2.200	3.660,54	2.612,74	2.578,28	2.870,04	2.911,84	2.987,84
	a. Nabati		3.560,91	2.485,77	2.462	2.791,68	2.800,13	2.877,91
	b. Hewani		99,63	126,97	117	78,36	111,71	109,93
2	Protein (gram/kap/hr)	57	78,89	68,75	66,41	58,31	68,23	68,23
	a. Nabati		67,96	50,28	51,19	49,36	55,47	55,90
	b. Hewani		10,93	18,47	15,22	8,95	12,76	12,33
3	Lemak (gram)		70,21	41,18	36,14	56,63	29,23	30,71
	a. Nabati		64,78	36,27	30,69	52,37	23,03	24,56
	b. Hewani		5,43	4,91	5,45	4,26	6,20	6,16

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung (2014)*

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Provinsi Lampung tahun 2014 (Atap Tahun 2013) mencapai 2.987,87 Kalori/Kapita/Hari (119,36 % dari angka kecukupan energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.200 Kalori, Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, Tahun 2004).

Tabel 27. PPH (Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2009 – 2014*

Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Padi-Padian	25	25	25	25	25	25	25
Umbi-Umbian	2,5	2,5	2,3	2,3	2,5	1,97	1,65
Pangan Hewani	24	10,3	11,7	10,5	7,08	10,06	9,40
Minyak dan Lemak	5	4,6	4,7	3,6	5,0	2,36	1,03
Buah/Biji Berminyak	1	0	0	-	0	-	-
Kacang-Kacangan	10	3,4	2,2	2,2	1,55	1,97	0,73
Gula	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sayur dan Buah	30	26,5	27,7	27,7	30,0	30	30
Lain-Lain	-	0	0	-	0	-	-
TOTAL	100	74,8	76,0	73,7	73,63	73,86	70,31

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung

Skor PPH (Ketersediaan) Provinsi Lampung Tahun 2014 baru mencapai 73,92 hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100

3. Kelembagaan Cadangan Pangan (Pemerintah dan Masyarakat/Lumbung) di Provinsi Lampung

a. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

Cadangan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu : cadangan pangan yang ada pada pemerintah dan cadangan pangan yang ada di masyarakat. Cadangan pangan yang ada di Pemerintah, yaitu pengadaan bahan pangan oleh pemerintah dalam rangka antisipasi penanganan rawan pangan akibat bencana dan untuk stabilisasi harga pangan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan Cadangan Pangan Pemerintah. Pengembangan cadangan pangan tersebut dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014, dan telah dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi sebanyak 205,958 ton beras yang di titipkan di Gudang Bulog Divre Lampung dengan Perjanjian berupa kesepakatan (MoU) dengan Bulog Divisi Regional Lampung tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Cadangan pangan pemerintah di titipkan pada Bulog yang tersebar di dolog wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Konsilog Lampung Selatan, Dolog Lampung Utara dan gudang bulog Divre Lampung di Bandar Lampung. Pada tahun 2014 di anggarkan kembali untuk penguatan cadangan pangan pemerintah sebesar 20 ton terealisasi 19,88 ton, sehingga pada tahun 2015 cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung dapat mencapai lebih dari 200 ton. Hal ini berarti cadangan pangan pemerintah Provinsi Lampung telah melebihi ketentuan yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Rincian cadangan pangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 - 2014

Pengadaan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Beras (Ton)	47.732,7	46.511,63	71.333,33	20.500	19,88
Total Pengadaan dari tahun 2010 – 2014				205,958 Ton	

b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Permentan No. 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, bahwa disetiap Kabupaten/Kota harus mempunyai cadangan pangan pemerintah sebanyak 60% dari 100 ton pada tahun 2015. Sehingga untuk memenuhi standar pelayanan minimal, perlu dukungan dari pemerintahan daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi target nasional tersebut. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 29, dibawah ini :

Tabel 29. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sampai Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Cadangan Pangan (Ton)
1.	Tanggamus	Kota Agung	Kampung Baru	-
2.	Way Kanan	Timur	Nuar Maju	6,32
3.	Lampung Utara	Buay Bahuga	Kelapa Tujuh	20
4.	Tulang Bawang	Kotabumi	Rawa Ragil	10
5.	Lampung Tengah	Selatan	Sido Mulyo	-
6.	Lampung Timur	Rawa Pitu	Giri	12,64
7.	Pesawaran	Punggur	Klopomulyo	20,20
8.	Bandar Lampung	Sekampung	Negeri Sakti	-
9.	Lampung Selatan	Gedong Tataan	Way Kandis	-
		Jati Agung	Lebung Nala	-
10.	Metro	Ketapanng	Cinta Mulya	12
		Candi Puro	Jati Mulya	
		Jati Agung		

Dari Tabel 29 dapat dilihat bahwa baru 6 Kabupaten/Kota yang benar-benar serius untuk menyediakan cadangan pangan pemerintah di wilayahnya, untuk Kota Metro meskipun belum memiliki gudang cadangan pangan pemerintah, tapi pemerintahnya sudah serius untuk menyediakan cadangan pangan pemerintah dengan dititipkan ke Divre Bulog Metro, sementara Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan meskipun sudah memiliki gudang cadangan pangan pemerintah, tapi pemerintahnya belum menganggarkan untuk mengisi gudang tersebut. Alasan pemerintah Kabupaten/Kota belum menyediakan gudang cadangan pangan pemerintah selain karena keterbatasan anggaran APBD Kabupaten juga karena mereka masih belum paham tentang tata cara pengelolaan gudang tersebut, karena beras merupakan bahan pangan yang tidak bisa tahan lama.

c. Lumbung Pangan Masyarakat

Cadangan pangan yang ada di masyarakat berupa lumbung pangan desa. Pengembangan lumbung pangan masyarakat di biayai dari dana DAK sejak tahun 2010. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang di bangun dengan sumber dana DAK dari tahun 2010 – 2013 berjumlah 141 lumbung. Upaya Pemerintah Provinsi selain memberikan bansos untuk pengisian lumbung pangan masyarakat yang dibangun dari dana DAK juga mendorong Kab/kota untuk merevitalisasi lumbung yang sudah ada dan membangun lumbung baru dalam rangka memperkuat cadangan pangan masyarakat.

Tabel 30. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat Melalui DAK Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013

No.	Kabupaten	Jumlah Lumbung				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Lampung Selatan	-	5	5	-	5
2	Tulang Bawang	-	4	6	-	4
3	Tanggamus	-	3	7	-	7
4	Lampung Tengah	-	7	7	-	8
5	Lampung Utara	-	4	4	-	8
6	Way Kanan	-	2	6	-	3
7	Pesawaran	-	6	3	-	2
8	Mesuji	-	2	2	-	0
9	Lampung Timur	-	14	0	-	7
10	Metro	-	0	0	-	4
11	Bandar Lampung	-	0	0	-	4
12	Lampung Barat	-	0	0	-	2
Jumlah		-	47	40	-	54

Tabel 31. Lokasi , Nama Kelompok dan Jumlah Cadangan Pangan di Lumbung Pangan Masyarakat (Lumbung DAK)

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok	Stok (Iron Stok) (kg)
I. Lumbung Dak Tahun 2010				
1.	Kabupaten Lampung Selatan			
	Way Panji	Sido Makmur	Makmur Sejati	75.000
	Sido Mulyo	Sido Mulyo	Mulyo Sari	-
	Natar	Rulung Helok	Seiring Sejalan	50.000
	Jati Agung	Rejo Mulyo	Rejo Makmur	75.000
	Palas	Bali Agung	Abadi Jaya	40.000
2.	Kabupaten Tulang Bawang			
	Dente Teladas	Way Dente	Agro Bangun Cipta	10.000
		Dente Makmur	Sidomakmur	10.000
	Rawa Jitu Selatan	Hargo Rejo	Pelita Sari	10.000
		Wono Agung	Sido Makmur	10.000
3.	Kabupaten Lampung Timur			
	Way Bungur	Tambah Subur	Cinta Makmur IV	6.235
	Purbolinggo	Taman Sari	Sri Rejeki	-
	Pekalongan	Adi Rejo	Sejahtera	14.080
	Raman Utara	Rejo Binangun	Sri Makmur I	4.230
	Batanghari Nuban	Kedaton I	Rukun Santoso	7.000
	Sukadana	Muara Jaya	Melati	4.250
	Mataram Baru	Kebun Damar	Sido Muncul III	4.525
	Marga Tiga	Gd. Wani Timur	Bina Karya III	9.000
	Labuhan Maringgai	Wonogiri	Sido Makmur II	10.765
		Way Bandar	Sri Rejeki I	-
	Pasir Sakti	Mekarsari	Ngudi Makmur	2.220
	Batanghari	Sumber Agung	Barokah	-
	Waway Karya	Sido Rahayu	Sido Jaya	-
	Way Jepara	Braja Sakti	Sido Muncul	-
4.	Kabupaten Tanggamus			
	Pulau Panggung	Tanjung Rejo	Sri Lestari	3.725
	Pugung	Way Pring	Bina Sejahtera I	-
	Wonosobo	Banyu Urip	Toriqul Jannah	-
5.	Kabupaten Lampung Tengah			
	Pubian	Pekandangan	Harapan Jaya	5.500
		Tawang Negeri	Tawang Maju	5.500
		Sinar Negeri	Harapan Jaya	5.000
	Bandar Mataram	Mataram Jaya	Tunas Jaya	4.010
	Seputih Surabaya	Kenanga Sari	Sukamaju	-
	Bandar Mataram	Sriwijaya	Mekar Jaya	-
	Sendang Agung	Sendang Agung	Bina Lestari	-
6.	Kabupaten Lampung Utara			
	Abung Selatan	Kembang	Sumber Makmur	4.000
	Abung Timur	Gading	Usaha Maju	3.500
	Abung Semuli	Rejo Mulyo	Wahana Tani	3.560
	Abung Surakarta	Semuli Raya	Karya Tani II	-
		Karya Sakti		
7.	Kabupaten Pesawaran			
	Padang Cermin	Pesawaran	Karya Subur	4.000
	Gedung Tataan	Indah	Makarti Jaya 2	5.500
	Punduh Pidada	Kutoarjo	Ariska II	6.500
	Way Lima	Bangun Rejo	Rukun Sentosa	-
	Kedondong	Sidodadi	Sri Rejeki I	-
	Tegineneng	Tanjung Rejo	Rukun Tani	-
		Margomulyo		
8.	Kabupaten Mesuji			
	Mesuji	Sidomulyo	Ngudi Rukun	-
	Panca Jaya	Adi Mulyo	Bina Usaha	-
9.	Kabupaten Way Kanan			

	Blambangan Umpu Rebang Tangkas	Sri Rejeki Gunung Sari	Sri Lestari I Karya Utama	4.300 0
II.	Lambung DAK Tahun 2011			
1.	Lampung Selatan			
	Candipuro Jati Agung Seragi Ketapang Palas	Trimomukti Marka Kaya Sumber Agung Sumur Bumi Restu	Sumber Makmur Lestari Agung Lestari Sri Merta Maju Makmur	9.308 4.546 75.000 40.000 4.445
2.	Tulang Bawang			
	Rawa Jitu Selatan Rawa Pitu	Yuda Karya Jitu Hargo Mulyo Medasari Andalas cermin Sumber Agung	Yuda Karya Jitu Hargo Mulyo Medasari Tani Karya Sumber Agung	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
3.	Tanggamus			
	Talang Padang Pugung Pulau Panggung Sumber Rejo Gisting	Sinar Petir Way Jaha Gunung Tiga Way Ilahan Kallibening Argopeni Banjar Manis	Harapan Makmur Sukamaju II Mitra Tani Mekar Sari Mekar Jaya Pelita Langgeng Sejahtera	4.300 - - 4.500 4.330 4.400 3.950
4.	Lampung Tengah			
	Sendang Agung Bandar Surabaya Bandar Mataram Seputih Agung Gunung Sugih Seputih Surabaya Kalirejo	Sendang Retno Gaya Baru V Mataram Udik Harapan Rejo Bangun Rejo Sumber Katon Sri Mulyo	Rukun Tani Bumi Makmur Sidomukti Mandiri Eka Sarana Maju Maju Bersama Laga Tani Guyup Rukun	5.000 4.000 4.010 5.000 5.000 4.700 5.000
5.	Lampung Utara			
	Abung Semuli Sungkai Selatan Tanjung Raja Kotabumi Utara	Papan Sari Karang Rejo Sindang Agung Sawo Jajar	Tunas Subur I Sido Makmur Sinar Harapan I Suka Tani	3.750 3.500 4.000 4.050
6.	Way Kanan			
	Negeri Besar Bahuga Pakuan Ratu Negara Batin Banjit Bumi Agung	Pagar Iman Sapto Renggo Negara Tama Purwa Negara Kemu Bumi Agung	Sumber Rejeki Makmur II Marem Tani Tunas mekar Sido Maju I Bina Karya I	4.000 4.000 4.000 5.600 7.000 5.200
7.	Pesawaran			
	Gedongtataan Negeri Katon Tegineneng	Negeri Sakti Sinar Bandung Rejo Agung	UPTD BBU Sinar Jaya Karya Maju	- 4.000 4.000
8.	Mesuji			
	Rawajitu Utara Mesuji Timur	Kurnia Agung Pangkal Mas Mulya	Eka Jaya Harapan Jaya	800 2.400
III	Lambung Pangan DAK 2013			
1.	Lampung Barat			
	Bandar Negeri Suoh Sukau	Bandar Agung Sukamulya	Sumber Barokah Talang Jawa	- -
2.	Way Kanan			
	Bumi Agung Negeri Besar Negara Batin	Karangan Negeri Jaya Purwo Agung	Harapan Jaya II Makmur Harapan Maju	- - -
3.	Lampung Utara			
	Abung Tinggi Kotabumi Selatan Abung Selatan	Ulak rengas Bandar Putih Abung Jayo	Sido Rukun Pelita Sejahtera Muda Berdikari	- - -

	Sungkai Barat Abung Surakarta Abung Timur Kotabumi Utara Blambangan Pagar	Gunung Raja Purba Sakti Bumi Jaya Banjar Wangi Tulung Singkip	Titian Sejahtera Trisno Maju Usaha Baru Tani Jaya Ngudi Mukti I	- - - - -
4.	Lampung Tengah			
	Gunung Sugih Kota Gajah Seputih Agung Bumi Ratu Nuban Seputih Mataram Seputih Surabaya Bandar Surabaya Selagai Lingga	Buyut Udik Nambah Rejo Muji Rahayu Bumi Rahayu Darma Agung Mataram Ilir Rajawali Lingga Pura	Sumber Rejeki Semeru Makmur Manunggal Jaya Makmur Mugi Rahayu Sido Makmur Bina Sejahtera Simpai Wargi	- - - - - - - -
5.	Lampung Timur			
	Way Jeparu Sukadana Sekampung Udik Batang Hari Sekampung Marga Tiga Raman Utara	Rejosari Bumi Ayu Bumi Mulyo Sumber Rejo Sidodadi Gedong Wani Rama Puja	Harapan Maju Setia Luhur Sahabat Tani Tani Maju Tirto Kencono Ngudi Makmur 3 Tambah Dadi	- - - - - - -
6.	Tanggamus	2q		
	Kota Agung Barat Pugung Talang Padang Semaka Pulau Panggung	Kesugihan Gunung Kasih Talang lebar Negri Agung Sukaraja Sudimoro Sri Menganten	Bina Karya Cempaka Harapan Maju Karya Maju Cipta Karya 3 Sri Rejeki 3 Jaya Makmur	- - - - - - -
7.	Pesawaran			
	Way Lima Negeri Katon	Way Harong Ponco Kresno	Karya Muda Mekar Berseri	- -
8.	Lampung Selatan			
	Natar Way Sulan Kalianda Merbau Mataram Seragi	Pancasila Talang Agom Merbau Mataram Marga Jasa	Agung Lestari Harapan Jaya Srikencono 4 Ngudip Rejeki Barokah	- - - - -
9.	Kota Metro			
	Metro Selatan Metro Timur Metro Utara	Rejomulyo Tejosari Purwoasri Banjar sari	Laksana I Tunas Muda Setuju Tunas Karya	- - - -
10.	Kota Bandar Lampung			
	Tanjung Senang Rajabasa Jaya Sukarame	Way Kandis Pematang Wangi Rajabasa Jaya Way Dadi	Rukun Sentosa Mulya Tani Harapan Kita Mitra Karya	- - - -

B. Distribusi Pangan dan Harga Pangan

Untuk mendukung distribusi agar pangan dapat sampai kepada masyarakat perlu adanya pengembangan pola distribusi dan sarana prasarana sehingga akan terjadi distribusi pangan yang merata dan dapat menekan harga yang terjadi akibat ekonomi biaya tinggi.

Dalam rangka pemantapan distribusi pangan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sedang merintis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) melalui gapoktan. Gapoktan ini diharapkan dapat membuat jaringan pemasaran komoditas unggulan dan mendukung stabilitas harga. Selain itu juga mengembangkan sistem tunda jual yang memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh harga jual yang memadai.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) merupakan kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan. Diberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok sehingga mampu mengembangkan sarana penyimpanan (gudang), dapat melakukan pembelian gabah/beras dan atau pangan pokok local spesifik lainnya bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi musim paceklik dan melakukan pembelian gabah/beras/jagung terutama dari hasil produksi petani anggotanya sehingga harga panen di tingkat petani saat panen raya stabil. Dengan diberdayakan gapoktan dapat dikembangkan usaha ekonomi wilayah dengan meningkatnya volume pembelian dan penjualan gabah/beras/jagung sehingga modal usaha Gapoktan meningkat dan meningkatkan nilai tambah produk. Diperluasnya jejaring kerjasama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya. Terlaksananya pemberdayaan Gapoktan tersebut memacu terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat khususnya gabah/beras/jagung.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pokok di Provinsi Lampung dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Operasi Pasar

Operasi pasar dilaksanakan sebagai upaya untuk pengendalian harga pangan pokok apabila harga telah melebihi 15% dari harga umum yang berlaku. Dalam pelaksanaan dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi sedangkan sebagai pelaksana adalah Bulog Divre Lampung. Operasi pasar dilakukan juga apabila ada permintaan dari Kabupaten/Kota.

2. Pasar Murah

Dalam upaya pengendalian harga pangan pokok selain Operasional Pasar dilaksanakan juga pasar murah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, ormas, swasta, BUMN maupun BUMD, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan nasional (HBKN).

3. Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Dalam rangka memelihara/mengendalikan nilai inflasi akibat dari kenaikan harga pangan pokok Pemerintah Provinsi Lampung membentuk TPID melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/213/B.IV/HK/2011 tanggal 4 April 2011. TPID mempunyai tugas antara lain melakukan pemantauan, inventarisasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi serta mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi. Selanjutnya merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Gubernur Lampung.

4. P-LDPM

Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani padi dan jagung, adalah :

- a. Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran
- b. Posisi tawar petani yang rendah
- c. Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Guna menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh petani, poktan, gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, Badan Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung sejak tahun 2009 melalui dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan melaksanakan program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). Pelaksanaan P-LDPM Provinsi Lampung dimulai pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, dengan peserta sebagai berikut :

a) Tahun 2009

- Tahap penumbuhan 25 Gapoktan di 5 Kabupaten yang menerima penghargaan P2BN , yaitu Kabupaten Lampung selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Lampung Barat.

b) Tahun 2010

- Tahap penumbuhan sebanyak 20 gapoktan di 7 kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Tanggamus;
- Tahap Pengembangan sebanyak 23 gapoktan pada 5 Kabupaten yaitu : kabupaten lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, kabupaten Lampung Barat dan kabupaten Tulang Bawang.

c) Tahun 2011

- Tahap penumbuhan sebanyak 17 Gapoktan di enam kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan;
- Tahap pra penumbuhan satu gapoktan di kabupaten Lampung Timur
- Tahap pengembangan 19 gapoktan di 7 kabupaten Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur dan Tanggamus.
- Tahap mandiri sebanyak 19 gapoktan di 5 Kabupaten kabupaten lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat dan kabupaten Tulang Bawang.

d) Tahun 2012

- Tahap penumbuhan sebanyak 21 Gapoktan di enam kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan;
- Tahap pengembangan 17 Gapoktan di enam kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan;
- Tahap Mandiri 17 Gapoktan berada di enam kabupaten yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah,

Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan;

e) Tahun 2013

- Tahap penumbuhan sebanyak 6 Gapoktan di 3 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus;
- Tahap pengembangan sebanyak 15 Gapoktan di 6 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan;
- Tahap mandiri 17 Gapoktan di 6 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.

f) Tahun 2014

- Tahap Penumbuhan sebanyak 6 Gapoktan di 2 Kabupaten yaitu Lampung Timur dan Tengah.
- Tahap Pengembangan sebanyak 12 Gapoktan yang terdiri dari 6 Gapoktan 2012 sebanyak dan 6 Gapoktan 2013 yang terdiri dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus
- Tahap Mandiri sebanyak 15 Gapoktan di Kab. Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus.

Tabel 32. Gapoktan Penguatan Lembaga Distribusi pangan Masyarakat P-LDPM Provinsi Lampung 2009-2014

No	Tahun	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan
1.	2009	Lampung Utara	Abung Surakarta	Bandar Sakti	Tani Makmur
			Tanjung Raja	Mekar Jaya	Sri Jaya
			Abung Selatan	Kemalo Agung	Karya Manunggal
			Abung Selatan	Trimodadi	Makmur Manunggal
		Lampung Tengah	Trimurjo	Pujokerto	Manunggal
			Trimurjo	Purwodadi	Purwodadi
			Seputih Raman	Rama Mukti	Multi Jaya
			Seputih Raman	Rama Oetama	Tani Makmur
			Seputih Mataram	Varia Agung	Varia Tani
			Terbanggi Besar	Ono Harjo	Panca Usaha
			Terbanggi Besar	Nambah Dadi	Tani Maju
		Lampung Selatan	Bandar Mataram	Mataram Udik	Karya Mandiri
			Way Panji	Bali Nuraga	Duta Tani Makmur
			Candipuro	Sido Asri	Sri Rejeki
			Tanjung Sari	Mulyosari	Suka Karya
			Bakauheni	Bakauheni	Mandiri

		Tulang Bawang Lampung Barat	Sragi Palas Menggala Rawapitu Gedung Meneng Gedung Meneng Gedung Aji Baru Sumber Jaya Pesisir Selatan	Margasari Bumidaya Menggala Batanghari Gunung Tapa Gd. Bdr. Rahayu Setiatani Tri Budi Syukur Sumur Jaya	Harapan Jaya Bersama Rawa Indah Batanghari Sri Mulyo Maju Mitra Tani Rahayu Mitra Tani Gumelar Jaya Sumur Indah
2.	2010	Lampung Utara Lampung Tengah Lampung Selatan Tulang Bawang Lampung Barat Lampung Timur Tanggamus	Abung Timur Abung Semuli Abung Surakarta Abung Timur Gunung Sugih Bangun Rejo Padang Ratu Natar Kalianda Candipuro Sragi Rawapitu Suoh Sumber Jaya Sekampung Batanghari Pekalongan Pugung Talang Padang Pugung	Sumber Agung Sido Rahayu Bumi Restu Sido Mukti Buyut Utara Sido Luhur Margorejo Merak Batin Sukatani Titiwangi Kuala Sekampung Bumi Asri Suoh Pura Jaya Giri Karto Bumi Harjo Siraman Babakan Way Halon Binjai Wangi	Agung Abadi Rahayu Restu Makmur Sido Marem Rukun Tani Budi Luhur Karya Tani Pendowo Margo Tani Satria Tani Karya Makmur Bumi Makmur Pertani Jaya 4 Jaya Bersama Giri Karto Maju Bersama Maju Makmur Sekawan Suka Maju Sumber Rejeki
3	2011	Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah Lampung Utara Tanggamus Way Kanan	Candipuro Sragi Batanghari Raman Utara Way Bungur Anak Ratu Aji Kotagajah Bumi Ratu Nuban Abung Tengah Sungkai Selatan Abung Tinggi Pugung Pugung Pugung Semaka Bahuga Bahuga	Banyumas Sukapura Purwosari Rejo Binangun Toto Mulyo Sri Mulyo Kotagajah Bulusari Gunung Sadar Bumi Ratu Sido Kayo Rantau Tijang Tanjung Heran Way Pring Sudimoro Bumi Agung Wates Sapto Renggo	Argo Makmur Mitra Mandiri Usaha Bersama Tri Tunggal Toto Mulyo Tani Makmur Maju Tama Sri Makmur Cipta Karya Makmur Bersama Sumber Tani Sido Luhur Rukun Karya Mekar Tani Tri Mulya Tunggal Bina Tani Tri Sapto Dadi
4.	2012	Lampung Selatan Lampung Timur	Ketapang Sragi Ketapang Raman Utara Bt. Hari Nuban Way Jepara Braja Selebah L. Maringgai Purbolinggo Sekampung	Pematang Pasir Mandala Sari Bangun Rejo Raman Pajar Trisno Mulyo Sumber Rejo Braja kencana Labuhan Maringgai Taman Fajar Sambikarto	Sri Rejeki Suka Makmur Subur Makmur Fajar Maju Catur Tunggal Karsa Panca Karsa Tani Makmur Makmur Abadi Fajar Makmur Gemari

		Lampung Tengah	Sendang Agung	Sendang Rejo	Windu Rejo
		Lampung Utara	Seputih Surabaya	Sri Katon	Suka Maju
			Abung Surakarta	Purba Sakti	Setia Karya
			Abung Semuli	Semuli Jaya	Jaya
		Tanggamus	Abung Surakarta	Karya Sakti	Gemah Ripah
			Semaka	Sri Katon	Sri Mekar Sari
			Semaka	Sri Purnomo	Sido Mukti
			Pugung	Tiuh Memon	Bumi Asih
			Semaka	Sidodadi	Sumber Asih
			Semaka	Kacapura	Sri Lancar
		Way Kanan	Buay Bahuga	Bumi Harjo	Sepakat
5.	2013	Lampung Tengah	Anak Ratu Aji	Karang Jawa	Margo Mukti
		Lampung Timur	Sendang Agung	Sendang Asri	Mekar Sari
			Bekri	Bangun Sari	Bangun Tani
		Tanggamus	Mataram Baru	Kebon Damar	Maju Lestari
			Labuhan Ratu	Labuhan Ratu VIII	Karunia
			Semaka	Karang Agung	Sinar Jaya
6	2014	Lampung Timur	Mataram Baru	Tulung Pasik	Lestari
		Lampung Tengah	Braja Selebar	Braja Harjosari	Mitra Tani
		Lampung Timur	Batang Hari	Sumber Agung	Karya Mandiri
		Lampung Selatan	Trimurjo	Pujo Basuki	Maju Laras
		Lampung Tengah	Anak Ratu Aji	Bandar Putih 2	Tani Sejahtera
		Lampung Timur	Punggur	Asto Mulyo	Podo Makmur
		Lampung Selatan	Sekampung	Sambi Karto	Gemari
		Lampung Tengah	Braja Selebar	Braja Kencana	Tani Makmur 2
		Lampung Timur	Sragi	Mandala Sari	Suka Makmur
		Lampung Selatan	Ketapang	Bangun Rejo	Subur Makmur
		Lampung Tengah	Purbolinggo	Taman Fajar	Fajar Makmur
		Lampung Timur	Anak Ratu Aji	Karang Jawa	Margo Mukti
		Lampung Timur	Sendang Agung	Sendang Asri	Mekar Sari
		Tanggamus	Bekri	Bangun Sari	Bangun Tani
		Lampung Selatan	Mataram Baru	Kebon Damar	Maju Lestari
		Lampung Timur	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu 8	Karunia
		Lampung Tengah	Semangka	Karang Agung	Sinar Jaya
		Lampung Selatan	Ketapang	Pematang Pasir	Sri Rejeki
		Lampung Timur	Raman Utara	Raman Pajar	Fajar Maju
		Lampung Tengah	Bt. Hari Nuban	Trisno Mulyo	Catur Tunggal
		Lampung Utara	Way Jepara	Sumber Rejo	Karsa
		Lampung Tengah	L. Maringgai	L. Maringgai	Panca Karsa
		Lampung Utara	Sendang Agung	Sendang Rejo	Makmur Abadi
		Tanggamus	Seputih Surabaya	Sri Katon	Windu Rejo
			Abung Surakarta	Purba Sakti	Suka Maju
			Abung Semuli	Semuli Jaya	Setia Karya
			Abung Surakarta	Karya Sakti	Jaya
			Semaka	Sri Katon	Gemah Ripah
			Semaka	Sri Purnomo	Sri Mekar Sari
			Pugung	Tiuh Memon	Sido Mukti
			Semaka	Sidodadi	Bumi Asih
			Semaka	Kacapura	Sumber Asih
		Way Kanan	Buay Bahuga	Bumi Harjo	Sri Lancar
					Sepakat

Harga berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan.

Terkait dengan hal tersebut, analisis harga pangan menjadi hal penting guna perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan serta membuat peramalan harga pangan ke depan. Daftar Harga Komoditas Pangan dapat dilihat pada tabel 33 berikut :

Tabel 33. Daftar Harga Komoditas Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2013.

No	NAMA BAHAN PANGAN		Harga			
			Rata-rata per Kg.			
			2010	2011	2012	2013
1	Padi/Gabah	- GKP	2.640	3.010	3.453	3.350
		- GKS	2.967	3.372	3.778	3.750
		- GKG	3.129	3.616	4.102	4.150
2	Beras	- Super	5.906	6.655	7.695	8.583
		-Medium	5.209	6.076	7.008	7.900
		- Asalan	4.769	5.522	6.402	6.450
3	Kacang Kedelai	- import/luar negeri	-	-	-	-
		- lokal/dalam negeri	6.545	6.274	6.094	-
4	Jagung PPL.Kering	- Mutu	2.415	3.222	3.209	3.482
		- asalan	1.807	2.359	2.212	2.697
5	Kacang Tanah	- kulit ari	9.402	11.324	12.132	19.000
		- kupas	12.290	13.047	14.778	23.000
9	Cabe.	- merah keriting	18.858	19.908	17.476	33.293
		.- Merah Besar	17.391	17.754	15.628	20.813
		- rawit kecil	16.503	19.642	16.776	40.000
10	Bawang Merah	- Bawang merah	9.540	11.923	8.632	29.500
11	Daging	- daging sapi murni	54.868	60.050	64.612	90.000
		- daging ayam broiler/potong	18.278	19.008	20.708	28.876
		- ayam broiler/potong hidup	16.781	27.503	18.537	-
		- ayam kampung hidup	31.135	33.261	32.267	-
12	Telur	- ayam ras	11.561	12.165	13.447	17.956
		- ayam kampung	1.347	1.559	1.784	-
		- bebek/itik	1.328	1.456	1.465	-
13	Gula Pasir	- import/luar negeri	-	-	-	-
		- Dalam Negeri/LokaL	9.841	9.023	10.335	13.000
14	Minyak Goreng	- Bimoli	-	-	-	14.000
		- Curah putih(kelapa)	9.148	9.277	10.134	-
		- Curah kuning(sawit)	8.323	8.944	9.173	12.000

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Lampung

Harga-harga bahan pangan utama yang menjadi unsur sembako menunjukkan peningkatan dari tahun- ketahun. Hal ini merupakan konsekwensi dari adanya perbaikan mutu, inflasi, dan peningkatan kebutuhan karena pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Walaupun demikian di Provinsi Lampung tidak pernah tercatat adanya kelangkaan bahan pangan

dan kelaparan di level keluarga dan individu karena rendahnya daya beli atau masalah distribusi.

C. Konsumsi Pangan

1. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relative, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Dari hasil survey tingkat konsumsi pangan penduduk Lampung bahwa Pola Pangan Harapan di Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan dengan komposisi konsumsi bahan pangan yang semakin mendekati berimbang pada 8 (delapan) bahan pangan mendekati standar yang ditetapkan oleh Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang digambarkan pada Tabel 34 sebagai berikut :

Tabel 34. Pola Pangan Harapan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014*

No	KOMPONEN	STANDAR	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25	25
2.	Umbi-umbian	2,5	1,6	2,1	2,2	2,0	1,2	0,8
3.	Pangan Hewani	24,0	15,4	19,1	20,3	19,6	14,1	14,4
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	6,8	5,9
7.	Gula	2,5	1,3	2,2	2,3	2,4	2,5	2,4
8.	Sayuran dan Buah	30,0	23,8	22,4	23,4	25,2	28,8	28,9
Jumlah		100	83,1	86,8	89,2	90,2	84,3	83,4

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Provinsi Lampung

Ket : *Data sementara

Dari Tabel 34 dapat digambarkan bahwa PPH di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang cukup berarti. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat sudah mulai mengarah Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 84,3 hal ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data BPS Pusat dan BKP Pusat. Pada tahun 2014

terjadi peningkatan kembali menjadi 85,4 (data sementara), hal ini banyak didukung oleh program Pemerintah daerah dimana Gubernur mengkoordinasikan unit-unit kerja dan LSM yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan untuk terus mensosialisasikan dan mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta menu dan makanan sehat, pameran, dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan Posyandu/PKK.

2. Tingkat Konsumsi Energi di Provinsi Lampung

Tingkat konsumsi energi di Provinsi Lampung secara umum telah mendekati standar yang ditetapkan secara nasional. Walaupun sampaitahun 2014 masih didominasi oleh asupan dari bahan pangan nabati, namun dari tabel 35 menunjukkan bahwa tahun 2014 telah terjadi perubahan yang signifikan dari pergeseran pola konsumsi energi yang bergeser ke arah keseimbangan pola konsumsi energi. Tingkat konsumsi energi di Provinsi Lampung di sajikan pada tabel 35 berikut.

Tabel 35. Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

(Kal/Kap/Tahun)

No	KELOMPOK PANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Padi-padian	1.078,1	1.032,1	1.088,7	1.008,2	1290,8	1233
2.	Umbi-umbian	66,8	76,6	125,1	81,1	48,5	33
3.	Pangan Hewani	159,0	170,0	146,7	196,3	140,7	144
4.	Minyak dan Lemak	242,5	222,1	255,7	230,1	283,6	295
5.	Buah/Biji Berminyak	48,9	59,3	15,7	37,9	62,1	57
6.	Kacang-kacangan	110,7	50,2	113,2	122,6	67,6	59
7.	Gula	53,1	106,0	77,9	94,3	108,6	95
8.	Sayuran dan Buah	98,4	92,1	92,8	100,9	115,2	116
9.	Lain-lain	20,2	94,5	1,4	37,5	38,8	36
	Total	1.878	1.902,7	1.917,2	1.908,8	2155,9	2067

3. Tingkat Konsumsi Protein

Seperti halnya pada konsumsi energi, Tingkat konsumsi protein di Provinsi Lampung pada tahun 2014 telah di atas standar nasional sebesar 57,3 gram/Kap/Hari. Hal ini merupakan prestasi, karena pada tahun 2009 tingkat konsumsi protein Lampung masih di bawah ketetapan standar kecukupan nasional. Peningkatan ini disebabkan karena kombinasi dari berbagai program Pemerintah daerah yang telah berhasil

meningkatkan pendapatan penduduknya, peningkatan ketersediaan bahan – bahan pangan sumber protein, penyuluhan dan sosialisasi tentang keseimbangan pangan dan gizi, serta perbaikan prasarana dan sarana distribusi.

Tabel 36. Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014

(gram/Kap/Hari)

No	KELOMPOK PANGAN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Padi-padian	24,1	24,2	25,0	25,8	30,1	28,7
2.	Umbi-umbian	0,3	0,5	0,6	0,8	0,3	0,2
3.	Pangan Hewani	15,2	15,4	16,0	16,5	13,2	13,5
4.	Minyak dan Lemak	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	0,8	0,8	1,2	1,4	0,7	0,7
6.	Kacang-kacangan	4,1	4,1	5,0	5,1	6,2	5,6
7.	Gula	0,2	0,2	0,3	0,4	0,1	0,1
8.	Sayuran dan Buah	2,3	3,6	3,8	4,0	4,7	4,3
9.	Lain-Lain	3,2	5,1	5,5	6,0	1,9	1,7
	Total	50,3	53,7	57,6	60,3	57,3	54,8

D. Keamanan Pangan

Kondisi Keamanan Pangan Sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat diseluruh lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Kondisi keamanan pangan di Provinsi Lampung cukup baik, yaitu telah berada diatas standar pelayanan minimal, dimana pada tahun 2015 SPM sebesar 80%, di Provinsi Lampung pada tahun 2014 sudah mencapai 82%.

Kebijakan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung dalam penanganan keamanan pangan antara lain dengan cara penguatan sistem legislasi yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 36 Thun 2013 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu Lampung dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/744/II.5/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Dari hasil pemantauan, produk pangan segar yang tidak aman terutama produk pangan segar asal impor dan yang berharga relatif mahal. Untuk menjaga keamanan pangan di Lampung, Pemerintah daerah secara aktif memberikan dana untuk melakukan survey keamanan pangan kepada

instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, UNILA, dan lain-lain. Selain itu juga dilakukan penyuluhan di posyandu, pasar-pasar, dan sosialisasi mengenai keamanan pangan melalui pameran, lomba, berita di mass media dan baliho serta poster di kawasan strategis.

Tabel 37. Hasil Pengujian Laboratorium Untuk Pangan Segar Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014*

NO	TAHUN	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH SAMPEL AMAN	PERSENTASE
1	2009	38	38	100%
2	2010	7	7	100%
3	2011	24	24	100%
4	2012	24	16	66,67%
5	2013	77	51	66,23%
6	2014	168	138	82,00%

Sumber Data : BKPD 2014

Dengan dukungan dana APBD, Badan Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah. Berikut ini data hasil pengambilan sample dan pengujian yang dilakukan pada jajanan anak sekolah dari tahun 2010-2014.

Tabel 38. Penanganan Jajanan Anak Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014

NO	TAHUN	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH SAMPEL AMAN	PERSENTASE
1	2009	-	-	-
2	2010	-	-	-
3	2011	437	346	79%
4	2012	946	881	93%
5	2013	-	-	-
6	2014	17	12	70%

Bekerjasama dengan Badan POM daerah dan UNILA, Pemerintah Daerah juga melakukan survey dan pembinaan keamanan pangan dengan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39. Hasil Uji Residu Pestisida Komoditi dan Lahan di Provinsi Lampung Tahun 2010

No.	Komoditi	Lokasi	Keterangan
1.	Jambu Mutiara	Batu Putu, Bandar Lampung	Negatif
2.	Buah Naga Putih	Batu Putu, Bandar Lampung	Negatif
3.	Buah Naga Merah	Batu Putu, Bandar Lampung	Negatif
4.	Manggis	Kota Agung, Tanggamus	Negatif
5.	Manggis	Mulang Maya, Tanggamus	Negatif
6.	Nanas	Punggur, Lampung Tengah	Profenofos, Dibawah BMR

Tabel 40. Hasil Uji Residu Pestisida di Provinsi Lampung Tahun 2011

No.	Komoditi	Lokasi	Keterangan
1.	Kacang Panjang	Pasar Kalianda	Negatif
2.	Cabe Merah	Pasar Kalianda	Negatif
3.	Timun	Pasar Kalianda	Profenofos, di bawah BMR
4.	Apel	Pasar Kalianda	Negatif
5.	Buah Naga	Pasar Kalianda	Negatif
6.	Pepaya	Pasar Kalianda	Negatif
7.	Kacang Panjang	Pasar Natar	Negatif
8.	Cabe Merah	Pasar Natar	Negatif
9.	Timun	Pasar Natar	Profenofos, di bawah BMR
10.	Apel	Pasar Natar	Negatif
11.	Buah Naga	Pasar Natar	Negatif
12.	Pepaya	Pasar Natar	Negatif
13.	Buah Naga merah	Batu Putu	Negatif
14.	Cabe Keriting	Lampung Tengah	Negatif
15.	Semangka	Lampung Tengah	Negatif
16.	Cabe Rawit	Lampung Tengah	Negatif
17.	Selada	Lampung Tengah	Negatif
18.	Terong	Lampung Tengah	Negatif
19.	Pisang Ambon	Lampung Tengah	Propinep, dibawah BMR
20.	Pepaya	Lampung Tengah	Negatif
21.	Kol	Lampung Tengah	Negatif
22.	Tomat Rampai	Lampung Tengah	Negatif
23.	Sawi	Lampung Tengah	Negatif
24.	Pare	Lampung Tengah	Negatif

Tabel 41. Hasil Uji Residu Pestisida di Provinsi Lampung Tahun 2012

No.	Komoditi	Lokasi	Keterangan
1.	Beras (Pemutih Klorin)	Psr Tradisional	Negatif
2.	Pear	Supermarket	Diazinon, di bwh BMR
3.	Apel Merah	Supermarket	Fentoin, Diazinon, dibwh BMR
4.	Anggur	Supermarket	Negatif
5.	Kembang Kol	Psr Tradisional	Negatif
6.	Kacang Panjang	Psr Tradisional	Negatif
7.	Wortel	Psr Tradisional	Profenofos
8.	Jeruk Santang	Psr Tradisional	Fention, Diazinon, diatas BMR
9.	Pisang Ambon	Psr Tradisional	Negatif
10.	Bayam Cabut	Psr Tradisional	Negatif
11.	Sawo (Pewarna)	Lampung Tengah	Negatif

Tabel 42. Hasil Uji Formalin Di Provinsi Lampung Tahun 2012

No.	Komoditi	Lokasi I (GudangLelang)	Lokasi II (Way Halim)	Lokasi III (SMEP)
1.	Tahu	Negatif	Negatif	Negatif
2.	Rumput Laut	Positif	Negatif	Negatif
3.	Brokoli	Negatif	Positif	Negatif
4.	Wortel	Negatif	Negatif	Negatif
5.	Tauge Kc. Hijau	Positif	Positif	Positif
6.	Kolang Kaling	Negatif	Negatif	Negatif
7.	Cincau Hitam	Negatif	Negatif	Negatif
8.	Jeruk Mandarin	Positif	Positif	Positif
9.	Jeruk Sunkist	Positif	-	-
10.	Kelengkeng	Positif	Positif	Positif
11.	Beras	Negatif	Negatif	Negatif
12.	Mangga Gd. Gincu	Positif	Positif	Positif
13.	Tauge Kecil	-	positif	-

Tabel 43. Hasil Uji Residu Antibiotika Pada Pangan Olahan Asal Daging Di Provinsi Lampung tahun 2012

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Jenis Antibiotika				
			Penicilines	Tetracyclines	Macrolides	Aminoglikosides	Sulfa
1	Dendeng	8	0	3	3	3	0
2	Abon	10	0	2	0	1	0
3	Sosis	10	0	4	0	0	0
4	Nugget	10	0	5	0	1	0
5	Burger	3	0	2	1	0	0
Jumlah		41	0	16	4	5	0

Tabel 44. Hasil Pemeriksaan residu Hormon Tahun 2012

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Jenis Uji Hormon	
			Diethylstilbestrol	Trenbolone acetate
1	Daging Ayam	30	Negatif	
2	Daging Sapi	10		Negatif
3	Otak Sapi	10		Negatif

Tabel 45. Hasil Pemeriksaan Cemaran Mikroba Tahun 2012

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Jenis Uji Cemaran Mikroba				
			TPC	Coliform	E. Coli	Salm onella	Staphylo coccus
1.	Daging Ayam	60	1	27	1	0	16
2.	Daging Sapi	30	0	12	1	0	6

Tabel 46. Hasil Pemeriksaan Residu Antibiotika TA. 2012

No	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Jenis Antibiotika				
			Penicilines	Tetracyclines	Macrolides	Aminoglikosides	Sulfa
1	Daging Sapi	30	0	0	0	1	0
2	Daging Ayam	60	0	0	0	0	0
3	Telur Ayam	100	0	3	0	5	0
4	Susu	20	0	4	0	0	0
Jumlah		210	0	7	0	0	0

Tabel 47. Hasil Uji Laboratorium (Uji Pestisida dan Formalin)

No.	Jenis Sample	Formalin	Jenis Pestisida								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cabe Merah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kubis/Kol		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Buah Naga		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Apel Fuji	-									
5.	Beras										
6.	Tauge	-									
7.	Kc. Panjang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Semangka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pear	-									
10.	Rumput Laut	-									
11.	Kolang Kaling	-									
12.	Anggur	+									
13.	Kentang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Kelengkeng	-									
15.	Buncis		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Mangga Indramayu	-									
17.	Pacar Cina										
18.	Kacang Tanah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Anggur Merah	+									
20.	Bawang Merah		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Nanas		-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Sawo	-									
23.	Melon	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Kacang Hijau		-	-	0,008	-	-	-	-	-	-
25.	Jamur Tiram	-									
26.	Pear	-									
27.	Rumput Laut	-									
28.	Buah Naga	-									
29.	Pear	-									
30.	Kentang		-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Tauge	-									
32.	Kelengkeng	-									

Ket : 1. Diazinon

2. Fention

3. Klorpirifos

4. Karbofuran

5. Dimetoat

6. Profenofos

7. Endosulfan

8. Aldrin

9. Paraquat

10. Pacar cina Positif pewarna buatan

Tabel 48. Hasil Pengujian Formalin dengan Menggunakan Rapid Tes Kit pada Buah dan Sayur Segar di Prov Lampung 2013

No.	Komoditi	Lokasi	Hasil Uji Formalin	Keterangan
1	Straberry	Hypermart	Negatif	
2	Oyong	Hypermart Hypermart	Negatif	
3	Wortel Import	Hypermart Hypermart	Negatif	
4	Kelengkeng	Hypermart Hypermart	Negatif	
5	Jeruk Medan Super	Hypermart	Negatif	
6	Jeruk Siam Madu	Ramayana	Negatif	
7	Jeruk Tien Kam	Ramayana	Negatif	
8	Timun Jap	Chandra	Positif	Import
9	Melon Rock	Chandra	Negatif	
10	Buah Naga Putih	Chandra	Negatif	
11	Semangka Kuning	Chandra	Negatif	
12	Anggur Hijau	Giant	Positif	Import
13	Kol Bulat	Giant	Positif	Lokal
14	Tauge	Giant	Positif	Lokal
15	Apel Gramny Smith	Giant	Positif	Import
16	Apel Malang	Giant	Negatif	
17	Jeruk Afourr	Giant	Negatif	
18	Semangka Merah	Giant	Negatif	
19	Anggur Merah	Gelael	Positif	Import
20	Buah Potong/Pear	Gelael	Positif	Import
21	Buah Potong/Apel Fuji	Gelael	Positif	Import
22	Jeruk Fremon	Gelael	Negatif	
23	Belimbing	Gelael	Positif	Lokal
24	Mangga Gedung Gincu	Gelael	Positif	Lokal
25	Pear Xian Lie	Gelael	Positif	Import
26	Apel USA	Pasar Tani	Positif	Import
27	Apel Fuji	Pasar Tani	Positif	Import
28	Pear Swee	Pasar Tani	Positif	Import
29	Sawi	Pasar Tani	Negatif	
30	Bawang Merah	Pasar Koga	Negatif	
31	Bawang Putih	Pasar Koga	Negatif	
32	Jeruk Lokal	Pasar Koga	Negatif	
33	Jeruk Import (Mandarin)	Pasar Koga	Positif	Import
34	Melon	Pasar Way Halim	Positif	Lokal
35	Pacar Cina	Pasar Way Halim	Positif	Lokal
36	Kangkung	Pasar Way Halim	Negatif	
37	Apel Wang Sam	Pasar Way Halim	Positif	Import
38	Capri	Pasar Way Halim	Positif	Lokal
39	Buncis	Pasar Way Kandis	Positif	Lokal
40	Brokoli	Pasar Way Kandis	Negatif	
41	Tauge	Pasar Way Kandis	Positif	Lokal
42	Cabe Rawit	Pasar Way Kandis	Negatif	
43	Tomat		Negatif	
44	Jeruk Lokal (Medan)		Negatif	
45	Kulang Kaling		Negatif	

Untuk mendukung keamanan pangan dari sisi produsen, Di Provinsi Lampung telah terbentuk UPT yang melakukan sertifikasi pangan segar. Sampai tahun 2013 sebanyak 124 Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikasi Prima 3 (sudah aman untuk dikonsumsi). Adapun Jumlah serta jenis pelaku yang sudah disertifikasi dapat dilihat pada tabel 49 berikut.

Tabel 49. Komoditas Unggulan Yang Sudah Di Sertifikasi Prima 3 (Aman dikonsumsi) Prov Lampung Tahun 2010-2013

No	Nama	Kelompok Tani	Luas (ha)	Lokasi	Komoditas
1	Agus Mayadi	Perorangan	1,00	Pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus	Manggis
2	Zubaidi	Perorangan	1,50	Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus	Manggis
3	Azhar	Perorangan	0,50	Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus	Manggis
4	Musiran	Perorangan	1,50	Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
5	Suparno	Perorangan	1,50	Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
6	Sugeng	Perorangan	1,50	Kampung Asto Mulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
7	Handitya Narapati	Perorangan	1,50	Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung	Buah Naga
8	Handitya Narapati	Perorangan	1,50	Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung	Jambu Biji
10	Handitya Narapati	Perorangan	1,50	Jl. WA Rachman No. 1,2,3 Kel. Batu Putu Kec. Teluk Betung Utara Kab. Bandar Lampung	Manggis
11	Kristono	Perorangan	0,50	Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan	Buah Naga
12	Hi. Guntur	Perorangan	1,25	Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan	Buah Naga
13	Arifin	Perorangan	0,25	Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan	Buah Naga
14	Sucipto Sadikin	Perorangan	1,00	Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan	Buah Naga
15	Lily Roswandi	Perorangan	0,25	Ds. Marga Jasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan	Buah Naga
16	Fajar	Perorangan	0,48	Ds. Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat	Wortel
17	Muhyono	Perorangan	0,50	Ds. Tanjung Raya Kec. Sukau, Kab. Lam-Bar	Tomat
18	Winarto	Perorangan	0,25	Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
19	Tugiyanto	Perorangan	1,00	Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
20	Edy Purwanto	Perorangan	1,00	Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
21	Sadiran	Perorangan	0,75	Ds. V Astomulyo	Nanas

				Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	
22	Sutrisno	Perorangan	0,50	Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
23	Ngadimin	Perorangan	0,37	Ds. V Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah	Nanas
24	Hasan Basri	Perorangan	1,00	Pekon Menggala Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus	Manggis
25	Ambariyanto	Perorangan	1,00	Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan	Pisang
26	Tuwuh A. Saputra	Perorangan	1,00	Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan	Pisang
27	Beben Wu	Perorangan	1,00	Desa Talang Baru Kec. Sido Mulyo Kab. Lampung Selatan	Pisang
28	Suroso	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
29	Sarno	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
30	Parwanto	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
31	Purnomo	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
32	Arif S.	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
33	Siget	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
34	Miran	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
35	Uyoto	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
36	Tukijo	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
37	Suntoro	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
38	Atam A.	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
39	Alam A.	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
40	Budi Hermawan	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
41	Suparmi	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
42	Ngadio	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
43	Supratman	Poktan Mekarsari	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
44	Sumanto	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
45	Pujiono	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
46	Sandi	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
47	A. Muheri	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
48	Wasirun	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der
49	Dapi	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Pow der

50	Sahri	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
51	Samin	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
52	Paimin	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
53	Badri	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
54	Supriyanto	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
55	Sodikin	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
56	Sunaryo	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
57	Ujek	Poktan Tani Harapan	1	Kp. Fajar Asri, Kec. Seputih Agung, Lamteng	Kencur/Powder
58	Mujiono	Tani Harapan Maju	1	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
59	Sujan	Tani Harapan Maju	0,5	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
60	Sarijo	Tani Harapan Maju	0,5	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
61	Suwondo	Tani Harapan Maju	1	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
62	Anto	Tani Harapan Maju	1	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
63	Tugino	Tani Harapan Maju	3	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
64	Kasido	Tani Harapan Maju	0,25	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
65	Supardi	Tani Harapan Maju	0,25	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
66	Boeman	Tani Harapan Maju	0,20	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
67	Wiji	Tani Harapan Maju	0,50	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
68	Wardoyo	Tani Harapan Maju	0,50	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
69	Rubiyono	Tani Harapan Maju	0,50	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
70	Sugiyono	Tani Harapan Maju	0,50	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
71	Sumpeni	Tani Harapan Maju	0,25	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
72	Pardi B.	Tani Harapan Maju	0,50	Kp. Sri Wayah, Kec. Anak Tuha, Kab. Lamteng	Jeruk
73	Sugiman	Poktan Sinjay	0,5	Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah	Nanas
74	Ponimin	Poktan Sinjay	0,25	Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah	Nanas
75	Sutiono	Poktan Sinjay	0,25	Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah	Nanas
76	Bambang Sulisno	Poktan Sinjay	0,25	Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah	Nanas
77	Edi Kurniawan	Poktan Sinjay	0,5	Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lampung Tengah	Nanas
78	Suparman	Poktan Sinjay	0,25	Dusun V, Kp. Astomulyo, Kec. Punggur, Lam-Teng	Nanas
79	Ruslan A.	Perorangan	0,5	Desa Suban, Kec. Merbau	Pepaya

	Gani			Mataram, Lamsel	
80	Banjar	Poktan Barokah	2	Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel	Pepaya
81	Jumali	Perorangan	0,5	Desa Suban, Kec. Merbau Mataram, Lamsel	Pepaya
82	Misdi	Poktan Karya Tani	1	Desa Bangun Rejo, Kec. Ketapang, Lamsel	Pisang
83	Harudin	Poktan Kebun Agung	6	Desa Ruang Tengah, Kec. Penengahan, Lamsel	Pisang
84	Kapin Unyi	Poktan Bina Usaha	1	Desa Taman Baru, Kec. Penengahan, Lamsel	Pisang
85	Efendi	Poktan Marga Jaya	2	Pekon Sukajadi, Kec. Air Hitam, Lampung Barat	Pisang
86	Taufik Hidayat	Peorangan	0,75	Pekon Sukajaya, Kec. Sumber Jaya, Lambar	Salak
87	Suparman	Perorangan	1	Pekon Sukajaya, Kec. Sumber Jaya, Lambar	Salak
88	Asmawati	Perorangan	1	Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar	Salak
89	Ahya	Perorangan	0,75	Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar	Salak
90	Adi Siswanto	Perorangan	0,50	Pekon Sukarame, Kec. Balik Bukit, Lambar	Salak
91	Sartono	Perorangan	1	Pekon Sukarame, Kec. Balik Bukit, Lambar	Salak
92	Karbani	Perorangan	1,5	Pekon Bawang, Kec. Balik Bukit, Lambar	Pisang
93	Ali Mustakim	Perorangan	0,50	Pekon Sabarus, Kec. Balik Bukit, Lambar	Pisang
94	Ruruh Rumanti	Perorangan	0,75	Pekon Tri Budi Syukur, Kec. Kebun Tebu, Lambar	Salak
95	Tabroni	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
96	Senen	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
97	Abdul Rahman	Tani Makkunyana II	0,50	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
98	Khoirudin	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
99	Sujono	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
100	Bahri	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
101	Zainudin	Tani Makkunyana II	0,50	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
102	Marhusin	Tani Makkunyana II	0,50	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
103	Rusli Idris	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
104	Hairozi	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
105	Poniman	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
106	Suwandi	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
107	Al Matsir	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
108	Masnah	Tani Makkunyana II	0,50	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
109	Rasyid	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
110	Boyaman	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
111	Azhar	Tani	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota	Manggis

		Makkunyana II		Agung, Tanggamus	
112	M. Umi	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
113	Selamet S.	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
114	Abu Bakar	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
115	Slamet Riyanto	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
116	Mat Nasir	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
117	Asri	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
118	Mat Hasan	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
119	Aminah MZ.	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
120	Safiruddin	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
121	Saripuddin	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
122	Suspaliyana	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
123	M. Sarip	Tani Makkunyana II	0,50	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis
124	Sarbini	Tani Makkunyana II	0,25	Pekon Terdana, Kec. Kota Agung, Tanggamus	Manggis

TABEL 50. REKAP HASIL UJI CEPAT (FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDA
DAN RHODAMIN B) DAN UJI LABORATORIUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
KEADAAN SAMPAI DESEMBER 2014

No.	Kabupaten	Jenis uji	Jumlah Sampel Yang Diuji	Hasil Uji		Jumlah Aman dikonsumsi	Komoditi	Jumlah komoditi		Hasil Uji				Asal Komoditi
				Negatif	Positif Terdeteksi			Sayur	Buah	Sayur (+)	Sayur (-)	Buah (+)	Buah (-)	
1	L. Barat	Formalin	10	5	5	5	Buah dan Sayur	5	5	2	3	3	2	Pasar Sekincau, Pasar Hamtobio
2	Pringsewu	Formalin	15	13	2	13	Buah dan Sayur	8	7	1	7	1	6	Pasar Pringsewu, Candra Supermarket
		Boraks	1	1	0	1	Bakso							Pasar Gading Rejo
		Pestisida	9	8	1	8	Buah dan Sayur	5	4	1	4	0	4	Pasar Induk Pringsewu
		Rhodamin B	1	0	1	0	Pacar Cina							Pasar Gading Rejo
3	Tanggamus	Formalin	10	8	2	8	Buah dan Sayur	5	5	2	3	0	5	Pasar Purwodadi Gisting
		Pestisida**)	5	1	4	5	Buah dan Sayur	4	1	0	4	0	1	Gisting Atas
4	Pesawaran	Formalin	10	6	4	6	Buah dan Sayur	7	3	4	3	0	3	Pasar Sukaraja Gedung Tataan
		Pestisida**)	3	0	3	3	Sayuran	3	0	0	3	0	0	Desa Bungursari Gedung Tataan
5	T. Bawang	Formalin	11	9	2	9	Buah dan Sayur	9	2	1	8	1	1	Pasar Tulang Bawang
6	Metro	Formalin	11	10	1	10	Buah dan Sayur	6	5	0	6	1	4	Pasar Cendrawasih Metro
		Pestisida**)	1	0	1	1	Sayuran	1	0	0	1	0	0	Desa Karang Rejo Metro Utara
7	B. Lampung	Formalin*)	5	2	3	2	Buah dan Sayur	1	4	0	1	3	1	Pasar Cimeng, Candra Supermarket
8	L. Timur	Formalin	11	10	1	10	Buah, Sayur dan Ikan Segar	3	8	0	3	1	7	Pasar Sukadana dan Pasar Pekalongan
		Rhodamin B	1	0	1	0	Cendol							Pasar Sukadana
		Boraks	1	1	0	1	Bakso							Pasar Sukadana
9	L. Selatan	Formalin	9	8	1	8	Buah dan	5	4	0	5	1	3	Pasar Inpres Kalianda

							Sayur							
		Formalin	2	2	0	2	Bakso ikan, tahu							
		Boraks	1	1	0	1	Bakso ikan							SD Bumi Agung
		Rhodamin B	3	1	2	1	Minuman agar							SD Bumi Agung, SD Way Urang
		Methyl Yellow	1	1	0	1	Manisan mangga							SD Bumi Agung
10	L. Tengah	Boraks	4	4	0	4	batagor, bakso, nugget, bakso ayam							SDN 1 Gunung Sugih
		Rhodamin B	2	1	1	1	Arum manis, Es doger							SD swasta Insan Kamil, SDN 1 Gunung Sugih
		Metyl Yellow	1	1	0	1	Sawo	0	1	0	0	0	1	Bandar Jaya
		Formalin	10	9	1	9	Buah dan sayur	6	4	0	5	1	3	Bandar Jaya
		Pestisida**)	4	0	4	4	Sayuran dan Buah	2	2	0	2	0	2	Petani Trimorjo
11	L. Utara	Pestisida	4	3	1	3	sayuran	4	0	1	3	0	0	Pasar Pagi Lampung Utara
		Formalin	7	7	0	7	Sayuran, Buah	2	5	0	2	0	5	Pasar pagi dan Pasar Buah Pelabuhan Kotabumi
12	Way Kanan	Formalin	11	10	1	10	sayuran, Buah	7	4	0	7	1	3	Pasar Baradatu, Pasar Blambangan Umpu dan Liok
13	T.B Barat	Pestisida	3	2	1	2	Sayuran	3	0	1	2	0	0	Pasar Panaragan
		Formalin	8	7	1	7	Sayuran, Buah	4	4	0	4	1	3	Pasar Panaragan dan Pasar Mulya Asri
14	Mesuji	Pestisida	4	2	2	2	Sayuran dan Buah	3	1	2	1	0	1	Pasar Brabasan
		Formalin	6	5	1	5	Sayuran, Buah	2	4	0	2	1	3	Pasar Brabasan
Jumlah			185	138	47	150		95	73	15	79	15	58	
Persentase (%)			100	74,59	25,41	81,08				15,79	83,16	20,55	79,45	

Ket:

*) Telah dilakukan Uji Lab. terhadap anggur, hasil positif formalin

**) Telah dilakukan uji Laboratorium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namun masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi)

E. Kemiskinan

Kondisi ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan masyarakat terkait dengan akses pangan dan daya beli, kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 50 sebagai berikut :

Tabel 50. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2009-2014*

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)			Persentase Penduduk Miskin (Ribuan)		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
2009	349.300	1.208,97	1.558.28	16,78	21,49	20,22
2010	301.700	1.178.20	1.479.93	14,30	20,65	18,94
2011	226.090	1.046.09	1.307.70	12,27	18,54	16,93
2012	241,100	1.023,39	1.264.48	12,00	17,63	16,18
2013	235,470	939,88	1.175.35	11,59	15,99	14,86
2014	230,630	912,28	1.142,92	11,08	15,41	14,28

Berdasarkan tabel 50 diatas terlihat bahwa penduduk miskin di Provinsi Lampung semakin berkurang, rata-rata pengurangannya adalah sebesar 1,19%. Pengurangan ini disebabkan oleh program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan investasi di Provinsi Lampung, program peningkatan produktivitas SDM Lampung melalui diklat kepada masyarakat, perbaikan infrastruktur, dan program subsidi dan bantuan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan produksi dan peningkatan iklim berusaha melalui penciptaan kondisi yang kondusif. Penurunan jumlah penduduk Lampung tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,58%

Walaupun Provinsi Lampung mengalami surplus pangan, namun masih terdapat penduduk yang mengalami kerawanan pangan kronis karena kemiskinan, kondisi kerentanan pangan di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 51 sebagai berikut :

Tabel 51. Situasi Desa Rentan dan Tahan Pangandi Provinsi Lampung Berdasarkan Peta FSVA Tahun 2013

No	KaKab	Jumlah Desa Prioritas					
		I	II	III	IV	V	VI
1	LAMPUNG BARAT	38	85	27	86	18	-
2	TANGGAMUS	26	87	46	91	26	2
3	LAMPUNG SELATAN	9	19	45	113	61	4
4	LAMPUNG TIMUR	6	87	27	64	70	3
5	LAMPUNG TENGAH	14	20	18	160	91	4
6	LAMPUNG UTARA	4	76	60	75	32	-
7	WAY KANAN	10	59	25	94	20	2
8	TULANG BAWANG	25	11	7	82	24	2
9	PESAWARAN	2	21	41	46	23	-
10	PRINGSEWU	1	16	8	44	30	2
11	MESUJI	24	12	-	32	7	1
12	TUBA BARAT	13	15	1	33	17	-
13	BANDATR LAMPUNG	-	2	2	14	61	19
14	METRO	-	2	0	1	17	2
JUMLAH		172	512	307	935	497	41
TOTAL DESA		2464					

Dari tabel 51 dapat terlihat bahwa masih banyak daerah rentan pangan yang masih menjadi prioritas utama (Prioritas I) dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus mendorong kabupaten/kota yang terdapat kecamatan/desa dalam kondisi rentan pangan untuk terus melakukan monitoring dengan melibatkan masyarakat dalam suatu sistim informasi dini, melakukan studi untuk kemudian diperoleh akar masalah kemiskinan dan kerentanan pangan di daerahnya. Dari hasil tersebut dapat disusun program untuk mengatasi kerentanan tersebut. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan daerah rawan pangan adalah melalui penguatan cadangan pangan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila diperlukan. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung juga terus

mengupayakan dan mendorong pemerintah Kabupaten/kota untuk juga menyiapkan cadangan pangan di tingkat Kecamatan dan desa.

F. Status Gizi Penduduk Provinsi Lampung

Kerawanan pangan dan gizi buruk masih cukup memprihatinkan, masalah ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, yang menjadi akses terhadap kesehatan, pendidikan, informasi dan memperburuk daya beli. Kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Lampung disajikan pada tabel 52 sebagai berikut :

Tabel 52. Jumlah Kasus Gizi Buruk di Prov. Lampung Tahun 2009 - 2013

Kabupaten/Kota	Kasus Gizi Buruk					Gizi Buruk yang Ditangani				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013*
Bandar Lampung	33	36	32	24		33	36	32	24	
Lampung Selatan	26	19	40	12		26	19	40	12	
Lampung Tengah	11	22	14	27		11	22	14	27	
Lampung Utara	11	12	13	14		11	12	13	14	
Lampung Barat	4	-	4	18		4	-	4	18	
Tulang Bawang	4	16	19	20		4	16	19	20	
Metro	6	8	10	28		6	8	10	28	
Lampung Timur	42	27	33	12		42	27	33	12	
Tanggamus	1	0	3	7		1	-	3	7	
Way Kanan	5	8	8	7		5	8	8	7	
Pesawaran	23	11	8	5		23	11	8	5	
Mesuji	5	4	4	7		5	4	4	7	
T. Bawang Barat	11	12	23	17		11	12	23	17	
Pringsewu	1	10	14	5		1	10	14	5	
J u m l a h	183	185	225	203	134	183	185	225	203	134

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Kebanyakan penyebab kasus gizi buruk disebabkan karena ketidak pedulian orangtua terhadap keseimbangan gizi keluarganya. Hal ini banyak terjadi di kawasan perkotaan yang notabene lebih tersedia bahan pangan dan pendapatannya lebih tinggi, hal tersebut perlu ditangani secara serius mengingat terkait pemahaman yang masih kurang terhadap pentingnya gizi seimbang dalam keluarga dan mitos negatif terhadap kebiasaan atau pola makan dalam keluarga.

G. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dilaksanakan secara

bertahap sampai dengan tahun 2015. Pelayanan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 yaitu disajikan pada Tabel 53.

Tabel 53. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2010 - 2014

Indikator	Persentase Capaian					Target Nasional 2015
	2010	2011	2012	2013	2014	
Penguatan Cadangan Pangan	23,87	47,13	82,80	93,05	171,00	60
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	100	100	100	100	100,00	100
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	100	93,62	90,62	81,08	80
Penanganan Daerah Rawan Pangan	15,05	25,27	50,00	91,89	80,00	60

1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan - Indikator Penguatan Cadangan Pangan

Pemerintah tingkat provinsi wajib memiliki lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyediakan cadangan pangan pemerintah sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras yang menurut target nasional diharapkan pada Tahun 2015 terpenuhi sebesar 60% (120 Ton Ekuivalen Beras). Melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung telah menyediakan cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi rawan pangan transien maupun kronis. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang dikelola mulai tahun 2010 - 2014 semakin berkembang sebagaimana terlihat pada Tabel 28.

Cadangan pangan tersebut dapat disalurkan ke daerah rawan pangan transien di beberapa wilayah kabupaten/kota yang terkena bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan lain-lain.

2. Distribusi dan Akses Pangan - Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan

Tujuan dari pelayanan dasar distribusi pangan adalah untuk menjamin agar seluruh wilayah dan rumahtangga dapat memperoleh pasokan pangan yang cukup dengan harga yang stabil dan terjangkau. Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan

berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut stabilisasi harga dan pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan pasokan pangan serta harga yang terjangkau terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan kabupaten kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen. Persentase capaian Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 mencapai target SPM sebesar 100% pada setiap tahunnya.

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan - Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat perlu dilakukan pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai. Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung telah melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan sesuai dengan kewenangannya. Persentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi tahun 2010-2014 semakin meningkat. Pelayanan dilaksanakan melalui pembinaan pada kantin jajanan sekolah, retail pangan dan produsen pangan segar. Jumlah sampel pangan yang diuji juga semakin meningkat, berturut-turut pada tahun 2010-2014 sebanyak 7, 24, 24, 77 dan 168 sampel. Untuk meningkatkan pelayanan pengawasan masih perlu ditingkatkan jumlah sampel pangan segar yang diuji. Melalui OKKPD juga telah dilakukan sertifikasi produk hasil pertanian yang setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2014 telah 149 pelaku usaha yang telah lulus sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian dalam hal ini buah dan sayuran.

4. Penanganan Kerawanan Pangan - Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan dilaksanakan melalui penyediaan data dan informasi situasi pangan dan gizi, analisis dan pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan melalui FSVA, penanggulangan kerawanan pangan melalui intervensi bantuan sosial pada daerah rawan pangan, penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat, dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan, serta penanganan rawan pangan melalui intervensi rawan pangan kronis dan transien.

H. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Pelayanan Badan Ketahanan Pangan 2010-2014 mendapat dukungan pendanaan dari APBD I dan APBN. Realisasi anggaran yang digunakan disajikan dalam Tabel di bawah ini.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan
Tahun 2010– 2014***

TARGET APBD (Rp)						REALISASI APBD (Rp)				
PROGR AM	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Administrasi Perkantoran	536.938.000	555.208.000	632.160.000	735.845.000	646.475.000	506.094.790	511.781.537	516.895.948	688.134.494	629.236.370
Sarana & Prasarana	65.000.000	229.000.000	95.000.000	88.982.000	520.450.000	45.073.000	218.162.500	88.609.500	11.500.000	477.347.000
Disiplin Aparatur	42.000.000	42.000.000	60.000.000	72.000.000	0	41.750.000	41.750.000	58.910.500	71.632.000	0
Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	42.000.000	34.656.000	200.000.000	101.395.000	123.320.000	38.332.500	34.111.000	175.206.000	101.067.200	122.584.100
Diversifikasi & Ketahanan Pangan	4.019.733.000	3.845.121.000	3.812.840.000	6.801.778.000	3.095.486.000	3.702.109.910	3.724.063.000	3.725.493.475	6.430.275.430	3.024.325.325
Total APBD	4.705.671.000	4.710.000.000	4.800.000.000	7.800.000.000	4.385.731.000	4.333.360.200	4.529.868.073	4.565.115.423	7.302.609.124	4.253.492.795
APBN Dekonsentrasi (Rp)						REALISASI APBN Dekonsentrasi (Rp)				
Diversifikasi & Ketahanan Pangan	8.160.000.000	10.536.243.000	16.014.700.000	14.985.558.000	9.142.067.000	7.950.709.367	9.691.628.000	15.647.083.000	14.785.633.450	8.848.424.500
APBN/TP (Rp)						REALISASI APBN/TP (Rp)				
Diversifikasi & Ketahanan Pangan	1.011.100.000	2.616.700.000	-	275.000.000	-	1.007.095.000	2.490.098.000	-	-	-
Total APBN	9.171.100.000	13.152.943.000	16.014.700.000	15.260.558.000	9.142.067.000	8.957.804.367	12.181.726.000	15.647.083.000	14.785.633.450	8.848.424.500

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Tantangan

- 1) Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan;
- 2) Belum efisiennya distribusi pangan;
- 3) Skor pola pangan harapan belum maksimal (capaian sampai dengan 2014 masih 85,4*) sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
- 4) Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;
- 5) Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan.

B. Peluang

- 1) Revitalisasi cadangan pangan masyarakat;
- 2) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 3) Peluang yang besar untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dengan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan;
- 4) Lampung memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III

ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Lampung. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan:
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan:
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;

- Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
 - Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota:
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan:
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (*feed back*) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan:
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

1. Visi

Visi Provinsi Lampung merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2015 - 2019. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Lampung yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2019 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 -2019 adalah :**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019"**.

Visi Pembangunan Provinsi Lampung ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Lampung dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Lampung, memperhatikan RPJPD Provinsi Lampung. Visi Pembangunan Provinsi Lampung tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Lampung yang Maju dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Maju

Maju mempunyai konotasi *modern* atau *industrialized*, dan menatap atau berorientasi ke depan. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan dan *civilization* (politik dan hukum) perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang memadai, berkualitas dan berskala tinggi. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang adil dan merata. Kemajuan suatu bangsa seperti diuraikan dalam visi pembangunan nasional juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan.

Menjadi provinsi yang maju adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang dapat menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Namun karena pemahaman kemandirian bukanlah keterisolasian maka ketergantungan pada wilayah Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. Pendapatan per kapita penduduk Lampung lebih baik dari rata-rata nasional dengan ditandai oleh pengangguran yang rendah. Desa tertinggal yang ada di Lampung menjadi semakin berkurang dan bertambah maju. Untuk menjadi maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan akan berimplikasi pada kemakmuran.

Sejahtera

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan, kesetaraan gender, pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

Kemakmuran hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Dengan tingginya kualitas sumber daya manusia akan terjadi proses pemberdayaan alamiah dalam masyarakat pada gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya saing daerah. Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri.

Lampung Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan terselenggara; terciptanya hubungan antar rakyat Lampung yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian; serta tersedia sarana dan prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah;
2. Meningkatkan Infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama;
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 1 yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah". Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Penegasan pelaksanaan misi melalui penguatan investasi diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan, memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan, dinamika ekonomi atraktif dengan jangkauan jaringan kerja berskala nasional dan internasional, meningkatkan pengetahuan dan teknologi untuk optimalisasi pemberdayaan potensi sumber daya, peningkatan daya saing daerah (komoditas, infrastruktur, pendidikan dan ilmu teknologi).

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Desa Mandiri Pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Dalamrangkaikutmendukungpembangunannasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

"Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan"

Kata-kata kuncidarivisitersebutdapatdijelaskanpadatabelberikutini.

Tabel 54. Pokok-Pokok Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Pokok-pokok Visi	Makna Visi
Ketahanan Pangan	Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan
Penganekaragaman Pangan	Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal
Sumber Daya Lokal	Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan efisiensi
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
Kemandirian Pangan	Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam di dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institution*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;

4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Dari Visi dan Misi tersebut terlihat bahwa Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan

Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kebutuhan energi per kapita.

Sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dapat diuraikan menjadi 9 (Sembilan) indikator kinerja meliputi :

1. Tercapainya ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan pangan hingga perseorangan secara merata yang beragam berbasis sumberdaya lokal yang ditunjukkan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan 88,7 pada tahun 2019;
2. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
3. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan *Coefficient of Variation* maksimum 10%;
4. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 87,7 di 2019;
6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) 2.064 Kkal/kap/hari untuk energi;
7. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) 57 Gram/kap/hr untuk protein pada tahun 2019;
8. Meningkatnya produk pangan segar yang tersertifikat minimal 10% setiap tahun.
9. Tercapainya peningkatan keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Lampung dan sesuai tugas pokok fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan sejalan dengan misi, visi dan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pusat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara

detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering baik berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Lampung telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sedang dalam proses tindak lanjut untuk diterbitkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dari Perda Nomor 2 Tahun 2013 tersebut. Infrastruktur pengairan berupa jaringan irigasi, kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luas 1.000 s/d 3.000 Ha atau daerah irigasi kecil lintas Kabupaten/Kota. Luas daerah irigasi kewenangan provinsi secara keseluruhan mencapai luas 19.340 Ha, yang berada pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Seputih-Sekampung, Mesuji-Tulang Bawang, dan Semangka. Daerah Irigasi (DI) Sekampung Sistem, yang meliputi: DI Sekampung, DI Punggur Utara, DI Batanghari Utara, dan DI Raman Utara, yang kondisinya banyak terdapat kerusakan. Kerusakan meliputi saluran sepanjang 8.550 m, 130 pintu air, dan 67

buah bangunan. Pada DI Batang Hari Utara kerusakan meliputi: saluran sepanjang 209 m, 442 buah pintu air; dan 172 buah bangunan. Pada DI Way Rarem meliputi: saluran sepanjang 2500 m, 79 buah pintu air, dan 15 buah bangunan. Pada sisi lain, kondisi jaringan tersier yang airnya terjamin umumnya dalam kondisi baik, namun pada petak tersier yang kurang cukup mendapatkan air umumnya mengalami kerusakan dengan proporsi rata-rata mencapai sekitar 30%. Pada tahun 2004, terdapat bendungan sebanyak 2 buah dan embung sebanyak 41 unit, sedangkan pada tahun 2007 bendungan bertambah menjadi 3 buah dan embung 84 unit. Fasilitas pengairan tersebut mampu mengairi sawah fungsional seluas 230.062 Ha dan pada tahun 2012 menjadi 535.124 Ha.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Lampung, merupakan tugas dan tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Lampung masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungny tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terkadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu

burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stakeholders* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah;
2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional.
3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (*shared vision*). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung daerah yang maju dan berdaya saing, dengan pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

4.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek, dan inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam **Misi Pertama** dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2015 – 2019 Provinsi Lampung yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”**.

Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickle down effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

4.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal
6. Meningkatkan keamanan pangan segar

Indikator Tujuan :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
2. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)
3. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)
4. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
6. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)
7. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Tabel 54. Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Misi	Tujuan			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2019
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah	Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	1. Skor PPH Ketersediaan	-	88,7
	Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan	%	1
	Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	Rp.	≥ HPP
		4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	%	CV < 10%
	Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan	5. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	-	87,7

	kesadaran masyarakat			
	Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	6. Jumlah konsumsi energi	Kkal/kap/hr	2.064
		7. Jumlah konsumsi protein	Gram/kap/hr	57,0
	Meningkatkan keamanan pangan segar	8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	%	10
		9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji	%	80 (dibawah ambang batas)

4.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam
2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen
4. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman
5. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)
6. Tercapainya keamanan pangan segar

Indikator sasaran kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
2. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
3. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
4. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen
5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
6. Jumlah Konsumsi energi
7. Jumlah Konsumsi Protein
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Tabel 55. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019									
Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan									
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal	1. Skor PPH Ketersediaan	-	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,52	85,6	88,0	88,20	88,7
Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan	%	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1	1	1	1	1
Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	Rp.	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
	4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	%		4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 10%	CV < 10%	CV < 10%	CV < 10%	CV < 10%
Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	5. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	-	Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1	85,0	85,9	86,8	87,7
Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk	6. Jumlah konsumsi energi	Kkal/kap/hr	Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	6. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2.004	2.019	2.034	2.043	2.064
	7. Jumlah konsumsi protein	Gr/kap/hr		7. Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	56,1	56,3	56,5	56,7	57

memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal									
Meningkatkan keamanan pangan segar	8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	%	Tercapainya keamanan pangan segar	8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	10%	10%	10%	10%	10%
	9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji	%		9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji	80% (dibawah ambang batas)	80% (dibawah ambang batas)	80% (dibawah ambang batas)	80% (dibawah ambang batas)	80% (dibawah ambang batas)

4.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 -2019.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategis, arah kebijakan dan program.

4.5.1 Strategi

Strategi untuk mencapai misi pertama : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, adalah :

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja, dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
4. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan usaha pangan;
5. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
6. Penanganan keamanan pangan segar.

4.5.2 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi pertama Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek :

1. Aspek ketersediaan pangan

Dalam aspek ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal dan memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

2. Keterjangkauan pangan

Difokuskan pada stabilisasi harga dan pasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan.

3. Pemanfaatan pangan

Difokuskan pada pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan pekarangan pangan dan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal ditunjang dengan pengawasan keamanan pangan segar.

Tabel 56. Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019			
Misi : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk (a) meningkatkan kapasitas produksi pangan domestic; (b) menyediakan lapangan kerja, dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat	Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal
Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;	Pemantapan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan

Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan penguatan kelembagaan usaha pangan;	Penguatan sistem distribusi dan stabilitas harga dan pasokan pangan serta pengelolaan cadangan pangan
Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	Pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;	Pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui pemberdayaan pekarangan pangan
Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;	Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal
Meningkatkan keamanan pangan segar	Tercapainya keamanan pangan segar	Penanganan keamanan pangan segar	Pengawasan keamanan pangan segar

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah pada satu urusan wajib bidang pangan.

5.1. Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, program dimaksud adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan
- f. Ketahanan Pangan

5.2. Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - k. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
 - l. Penatausahaan Aset Daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - c. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - b. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Provinsi Lampung
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
- 5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
- a. Bimtek Mutu dan Keamanan Pangan
 - b. Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar
 - c. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)
 - d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - e. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP
 - f. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
 - g. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
 - h. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
 - i. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan
 - j. Alur Distribusi Pangan
 - k. Kegiatan Akses Pangan
 - l. Operasional Pengawasan Mutu dan keamanan pangan OKKPD

- m. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian yang sudah Sertifikasi/Registrasi/Produk yang beredar
- n. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065
- o. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis
- p. Audit Internal
- q. Promosi Produk Unggulan Lampung yang sudah Sertifikasi/Registrasi
- r. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra
- s. Gerakan Percepatan penganekaragaman Konsumsi pangan
- t. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pemanfaatan Pekarangan
- u. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional
- v. Penyusunan Pola Pangan Harapan
- w. Promosi Pangan Segar dan Olahan
- x. Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
- y. Konsolidasi/Koordinasi Dewan ketahanan Pangan
- z. Pengembangan Jejaring keamanan Pangan dan Promosi Keamanan Pangan Segar
 - aa. Pengembangan Usaha pangan lokal
 - bb. Pemantauan dan pengendalian Mobilitas Pangan
 - cc. Pembinaan Manajemen Kelembagaan
 - dd. Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat
 - bb. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga
 - ff. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium UPT OKKPD Prov. Lampung dan Sarana Prasarana OKKPD

5.3. Kelompok Sasaran

Aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), wanita tani, PKK, Pelaku Usaha, Anak Sekolah dan sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 5.1 Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BKPD Prov. Lampung 2015 - 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pd Thn Awal Perencanaan	Target dan Kerangka Pendanaan (x 1.000)												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2015		Tahun-2 2016		Tahun-3 2017		Tahun-4 2018		Tahun-5 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas	1	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sumberdaya aparatur & sarana prasarana perkantoran yang berkualitas (Orang)	73	76	154,62	80	162.359	85	1.047.000	90	1.094.000	95	1.141.000	95	1.141.000	BKPD	BDL
			1.1	Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas & perlengkapan aparatur (PNS; PTHL)	73 ; 7	76; 7	96,128	80; 7	100.934	85; 8	122.760	90; 8	129.360	95; 8	135.960	95; 8	135.960	BKPD	
			1.2	Peningkatan SDM dan budaya kerja	Jumlah sdm/aparatur yang terbina(diklat/ bimtek)	30	30	58,500	30	61.425	30	64.496	30	67.721	30	71.107	30	71.107	71.107	
			2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	12	12	323.000	12	339.150	12	247.190	12 bln	254.606	12	262.244	12	262.244	BKPD	BL
			2.1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Pembiayaan operasional kendaraan	12	12	200.000	12	210.000	12	220.000	12	231.525	12	243.101	12	243.101	BKPD	
			2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan kantor yg	7; 20	8; 20	150.000	8; 20	157.500	8; 20	165.375	8; 20	173.644	8; 20	182.326	8; 20	182.326	BKPD	

		terpelihara (Komputer; AC)															
2.3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah unit gedung/kantor (Unit/paket)	-	5	23.000	1	24.150	1	25.358	1	26.625	1	27.957	1	27.957	BKPD	
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya administrasi perkantoran yang baik (bulan layanan)	12	12	948.891	12	1.003.890	12	1.006.679	12	1.036.879	12	1.067.986	12	1.067.986	BKPD	BL
3.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembiayaan jasa komunikasi, sbrdy air & listrik (bulan layanan)	12	12	130.00	12	140.000	12	147.000	12	161.700	12	177.870	12	177.870	BKPD	
3.2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembiayaan jasa/honor administrasi keuangan (bulan layanan)	12	12	166.200	12	175.000	12	183.750	12	192.938	12	202.000	12	202.000	BKPD	
3.3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan ATK (bulan layanan)	12	12	30.000	12	35.000	12	36.750	12	38.588	12	40.517	12	40.517	BKPD	
3.4	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan & penggandaan (bulan layanan)	12	12	21.843	12	23.000	12	24.150	12	25.538	12	26.625	12	26.625	BKPD	
3.5	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan layanan)	12	12	25.000	12	26.250	12	27.563	12	28.941	12	30.388	12	30.388	BKPD	
3.6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor (bulan layanan)	12	12	160.000	12	168.000	12	176.400	12	185.220	12	194.481	12	194.481	BKPD	BL

			3.7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (bulan layanan)	12	12	25.000	12	26.250	12	27.563	12	28.941	12	30.388	12	30.388	BKPD	
			3.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan (jenis/eksemplar)	4 /9	4 /9	15.000	4 /9	15.700	4 /9	16.538	4 /9	17.364	4 /9	18.233	4 /9	18.233	BKPD	
			3.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi luar daerah	9	9	150.000	9	157.500	9	165.375	9	173.644	9	182.326	9	182.326	BKPD	
			3.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi/konsultasi dlm daerah	29	29	150.000	29	157.500	29	165.375	29	173.644	29	182.326	29	182.326	BKPD	
			3.11	Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Pembiayaan pengelolaan Keuangan SKPD (paket/bln)	1/12	1/12	65.848	1/12	69.140	1/12	72.597	1/12	76.227	1/12	80.039	1/12	80.039	BKPD	
			3.12	Penatausahaan aset daerah	Jumlah dokumen penatausahaan aset daerah	1	1	10.000	1	10.500	1	11.025	1	11.576	1	12.155	1	12.156	BKPD	
			4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja (bulan layanan)	12	12	210.000	12	220.500	12	222.789	12	229.473	12	236.357	1	236.356	BKPD	BL
			4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja SKPD	7	7	110.000	7	115.500	7	121.275	7	127.339	7	133.706	7	133.706	BKPD	
			4.2	Penyusunan rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan (Renja dan RKA SKPD)	2	2	100	2	105.000	2	110.250	2	115.763	2	121.551	2	121.551	BKPD	

			5.	Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pemberdayaan, ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan			3.957.720		3.557.085		3.663.798		3.773.712		3.886.924		3.886.924	
Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				73,92	87,58		85,6		88,0		88,2		88,7		88,7		
Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat	Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				83,4	84,1		85,0		85,9		86,8		87,7		87,7		
Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal	Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)	Jumlah Konsumsi Energi Jumlah Konsumsi Protein				2.062	2.004		2.019		2.034		2.043		2.064		2.064		
			5.1	Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	Jumlah kab/kt	10	15	150.000	15	300.000	15	300.000	15	330.000	15	363.000	15	363.000	BKPD
			5.2	Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah lomba yang diikuti/ di selenggarakan	2	2	93.600	2	150.000	2	150.000	2	165.000	2	181.000	2	181.000	BKPD
			5.3	Promosi pangan segar dan olahan	Jumlah promosi pangan segar	1	1	200.000	1	250.000	1	300.000	1	330.000	1	363.000	1	363.000	BKPD
			5.4	Hari pangan sedunia TK, Provinsi dan TK. Nasional	Jumlah kegiatan peringatan HPS	2	2	300.000	2	350.000	2	375.000	2	412.000	2	453.750	2	453.750	BKPD

			5.5	Pengembangan usaha pangan lokal	Jumlah pelaku usaha yang terbina	5	5	125.000	5	250.000	5	250.000	8	275.000	10	302.500	10	302.500	BKPD	
			5.6	Penyusunan pola pangan harapan	Jumlah laporan analisis	1	1	250.000	1	250.000	1	275.000	1	302.500	1	332.750	1	332.750	BKPD	
			5.7	Pembinaan dan pemantauan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah Kab/Kota yang terbina	14	15	250.000	15	250.000	15	250.000	15	275.000	15	302.000	15	302.000	BKPD	
Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	Persentase Penurunan jumlah penduduk rawan pangan				0,18%	1%		1%		1%		1%		1%		1%			
			5.8	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung yang dibina	5	18	167.073	18	260.000	18	260.000	18	286.000	18	314.000	18	314.000	BKPD	
			5.9	Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)	20	20	211.995	20	400.000	20	410.000	20	420.000	20	420.000	20	420.000	BKPD	
			5.10	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kawasan desa mandiri pangan yang terbina	4	6	150.000	6	250.000	8	300.000	10	330.000	10	363.000	10	363.000	BKPD	
			5.11	Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Jumlah laporan/peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	1	175.000	1	200.000	1	220.000	1	250.000	1	275.000	1	275.000	BKPD	
			5.12	Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP	Jumlah lokasi pemantauan	14	15	100.000	15	150.000	15	250.000	15	275.000	15	302.500	15	302.500	BKPD	
			5.13	Konsolidasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat/ Koordinasi dan konsultasi	2	2	350.000	4	375.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	4	400.000	BKPD	

Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen Coefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen			≥ HPP	≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP		≥ HPP			
					CV<10%	Cv<10%		CV<10%,		Cv<10%		Cv<10%		Cv<10%					
			5.14	Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan	Jumlah gapoktan yang diberdayakan	50	77	150.000	80	250.000	85	300.000	90	330.000	95	363.000	95	363.000	BKPD
			5.15	Kegiatan Akses Pangan	Jumlah laporan	1	1	150.000	1	200.000	1	250.000	1	275.000	1	302.000	1	302.000	BKPD
			5.16	Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan	Jumlah laporan	1	1	100.000	1	200.000	1	250.000	1	275.000	1	300.000	1	300.000	BKPD
			5.17	Pembinaan manajemen kelembagaan	Jumlah gapoktan yang terbina	-	50	125.000	77	130.000	80	135.000	85	140.000	90	145.000	90	145.000	BKPD
			5.18	Alur distribusi pangan	Jumlah laporan	1	1	150.000	1	250.000	1	250.000	1	275.000	1	300.000	1	300.000	BKPD
Meningkatkan keamanan pangan segar	Tercapainya keamanan pangan segar	Persentase Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	5.19	Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra	Jumlah pelaku usaha yg memahami penerapan mutu dan keamanan pangan di lokasi sentra	10	10		10			10		10		10			
			5.20	Penyempurnaan dokumen sistem mutu mengacu pada ISO/IEC 17065	Jumlah dokumen system mutu yg sesuai dg ISO/IEC17065	30	30	60.000	30	100.000		150.000	30	165.000	30	181.500	15	242.000	BKPD
			5.21	Audit internal	Jumlah bidang yang di audit	7	4	30.000	4	90.000		100.000	4	110.000	4	121.000	4	242.000	BKPD
						3	3	70.000	3	75.000		95.000	3	104.500	3	114.950	3	114.950	BKPD

			5.22	Promosi produk unggulan Lampung yang sudah sertifikasi/ registrasi	Jumlah promosi produk unggulan Lampung yg telah tersertifikasi	2	2	100.000	2	110.000		121.000	2	133.000	2	146.410	1	146.410	BKPD
			5.23	Pengembangan produk pangan segar yang bermutu dan bersertifikat	Jumlah laporan/dokumen pengembangan produk pangan segar yg bermutu & bersertifikat	1	1	100.000	1	110.000		121.000	1	133.100	1	146.410	1	146.410	BKPD
			5.24	Operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD	Pembiayaan operasional pengawasan mutu & keamanan pangan OKKPD	12	12	175.000	12	200.000		250.000	12	275.000	2	302.500	12	302.500	BKPD
			5.25	Surveilan dan pengawasan produk hasil pertanian yang sudah sertifikasi/registrasi /produk yang beredar	Jumlah surveilan & pengawasan produk/komoditas yg sudah bersertifikat/registrasi (kab/kota)	12	8	150.000	9	165.000		181.000	10	199.650	11	219.615	11	219.615	BKPD
			5.26	Sertifikasi/ Registrasi Produk Labelisasi Prima 3	Jumlah pelaku usaha yg akan disertifikasi, registrasi	20	40	200.000	45	250.000		300.000	55	330.000	60	363.000	60	363.000	BKPD
			5.27	Pembangunan Gedung Kantor, Laboratorium UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Prov. Lampung dan Sarana Prasarana OKKPD (DAK + pendampingan)	Jumlah gedung kantor/laboratorium dan sarana prasarannya (gedung/paket)	-	1	2.300.000	1	3.450.000		1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	BKPD
		Persentase Tingkat keamanan pangan segar yang diuji	5.28	Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan & Promosi Keamanan Pangan segar	Jumlah pembinaan promosi dan keamanan pangan	80% (dibawah ambang batas)	80 %		80 %		80%		80%		80%		80%		
						5	5	200.000	10	300.000	15	350.000	15	385.000	15	423.500	15	423.500	BKPD

Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan & kesadaran masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal yang bermutu dan aman	Meningkatnya pemantapan pengane karagaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Skor Pola Pangan Harapan konsumsi - Jumlah Konsumsi Energi(Kkal/kap/hr) - Jumlah Konsumsi protein (gr/kap/hr) - Peningkatan produk pangan segar yg tersertifikasi - Tingkat keamanan pangan segar yang diuji (%) 	6.1	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (Desa) - Jumlah pemantauan pengane karagaman konsumsi pangan (Lokasi) - Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (Lokasi) - Jumlah model pengembangan pangan pokok local (Unit) - Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan - Jumlah hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan 	30	35	3.334.008	36	900.000	37	1.100.000	38	1.210.000	39	1.331.000	39	1.331.000	BKPD	
Memperkuat manajemen organisasi ketahanan pangan	Terselenggaranya pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan pangan	Tersediaan dokumen perencanaan program anggaran, keuangan & kerjasama	6.4	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen rencana program dan kerjasama - Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan - Jumlah 	1	1	1.204.808	1	660.000	1	850.000	1	935.000	1	1.028.500	1	1.028.500	BKPD	

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BKPD dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2015-2019. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel dibawah ini

Tabel58. Indikator Kinerja SKPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode renstra	Target Capaian Setiap Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	73,92	87,52	85,60	88,00	88,20	88,70	88,70
2.	Persentase Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	0,18%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
3.	Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tk. Produsen	Rp. 3.557 ≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4.	Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tk. Konsumen	$cv \leq 6\%$	$cv \leq 10\%$	$cv \leq 10\%$	$cv \leq 10\%$	$cv \leq 10\%$	$cv \leq 10\%$	$cv \leq 10\%$
5.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	80,43	84,1	85,0	85,9	86,8	87,7	87,7
6.	Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kap/th)	2.062,4	2.004	2.019	2.034	2.043	2.064	2.064
7.	Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	54,4	56,10	56,30	56,50	56,70	57,00	57,00

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi "**Lampung Maju Dan Sejahtera 2019**".

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah mengalami sedikit penyesuaian sehingga perlu dilakukan revisi, dikarenakan target kinerja sudah tidak sesuai lagi dengan RPJMD Provinsi Lampung.

Periodesasi Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Pada saat Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 belum tersusun, maka Renstra Tahun 2015-2019 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.